

PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

DALAM PROSES PEMANDIRIAN DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG



O l e h

Drs. Syafruddin Wahid

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
P A D A N G
1 9 9 1

KATA PENGANTAR

Pertama sekali penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang karena rahmat dan kurnia-Nya penulis dapat menyelesaikan buku ini. Buku ini ditujukan kepada mereka yang tengah berjuang meningkatkan mutu kehidupan manusia melalui berbagai pendekatan, terutama sekali melalui berbagai kegiatan pendidikan luar sekolah dalam kalangan masyarakat desa. Selain daripada itu buku ini juga ditujukan kepada mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk menyumbangkan dermabaktinya bagi pembangunan bangsa, yakni mereka yang sedang mempelajari masalah-masalah pendidikan dan sumbangannya bagi pembangunan masyarakat, baik melalui lembaga pendidikan sekolah maupun melalui lembaga pendidikan luar sekolah. Sesuai dengan maksud tersebut, buku ini diberi judul, "Pendidikan Luar Sekolah dalam Proses Pemandirian dan Pembangunan Masyarakat Desa".

Dorongan untuk menulis buku ini timbul setelah mengamati--baik secara langsung maupun melalui berbagai literatur--masalah-masalah pembangunan masyarakat desa. Dari pengamatan tersebut, penulis berkesimpulan bahwa masalah utama dari pembangunan masyarakat desa ialah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Rendahnya partisipasi tersebut dikarenakan rendahnya kepercayaan diri masyarakat desa untuk membangun diri dan masyarakatnya sendiri. Masyarakat desa sangat tergantung kepada proyek yang datang dari atas (pemerintah), seolah-olah pembangunan adalah tanggung jawab pemerintah belaka. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kemandirianlah yang kurang pada masyarakat desa.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, kiranya untuk keberhasilan pembangunan masyarakat desa, setiap orang yang mempunyai kepedulian terhadap pembangunan masyarakat desa haruslah mengutamakan proses pemandirian dalam sega-

la bentuk kegiatannya. Pada dasarnya proses pemandirian tersebut dapat ditumbuhkembangkan dalam setiap setting kehidupan manusia, baik dalam kelompok, tempat kerja, atau dalam lembaga pendidikan. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, maka setiap lembaga pendidikan berkewajiban menumbuhkembangkan kemandirian. Akan tetapi, mengingat berbagai keterbatasan pendidikan sekolah dan keterbatasan masyarakat desa sendiri, kiranya pendidikan luar sekolahlah yang paling tepat didayagunakan bagi pemandirian masyarakat desa untuk kepentingan pembangunan masyarakat itu sendiri. Persoalan berikutnya ialah, meskipun berbagai kegiatan pendidikan luar sekolah telah dilaksanakan di pedesaan, namun penerapannya masih merupakan penerapan "sistem sekolah" dalam pendidikan luar sekolah, sehingga pemandirian terabaikan. Oleh karena itulah penulis terdorong untuk menulis buku ini dengan harapan dapat memberikan sumbangan bagi pemeranan pendidikan luar sekolah sesuai dengan yang diharapkan.

Selain daripada itu, buku ini juga diharapkan dapat memperkaya bahan bacaan mahasiswa jurusan pendidikan luar sekolah dalam rangka memperluas wawasan mereka tentang pendidikan dan pembangunan yang merupakan bidang kajian jurusan tersebut.

Selanjutnya, karena berbagai keterbatasan penulis, penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, di dalamnya akan ditemukan berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai sumbangan pikiran dari para pembaca, baik berupa kritik ataupun saran, sehingga untuk penerbitan berikutnya penulis dapat melakukan perbaikan-perbaikan guna pengembangan ke arah yang lebih memadai. Akhirnya penulis berharap semoga buku ini bermanfaat, baik untuk keperluan praktis maupun untuk pengembangan ilmu.

Padang, Agustus 1991

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
I. PENDAHULUAN	1
II. PEMAHAMAN TERHADAP PROSES PEMANDIRIAN	6
A. Pengertian Proses Pemandirian	6
B. Rumusan Kemandirian	9
C. Motif Berprestasi dan Kemandirian	12
III. BEBERAPA TEMPAT YANG POTENSIAL BAGI PROSES PEMANDIRIAN	16
A. Proses Pemandirian dalam Kelompok	16
B. Pemandirian dalam Lembaga Kerja	18
C. Pemandirian dalam Lembaga Pendidikan	21
1. Pemandirian dalam Lembaga Pendidikan Sekolah	22
2. Pemandirian dalam Lembaga Pendidikan Keluarga	25
IV. PEMANDIRIAN MELALUI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH	27
A. Pembentukan Kelompok Kecil	27
B. Pengalihan Tanggung Jawab	28
C. Kepemimpinan Warga Belajar	29
D. "Orang Luar" sebagai Fasilitator	30
E. Demokratisasi	31
V. PENGEMBANGAN SISTEM PLS DALAM RANGKA PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA	35
A. Pendidikan Luar Sekolah sebagai Suatu Sistem	35
1. Pengertian Sistem	35

	Halaman
2. Pendidikan Luar Sekolah dalam Sistem Pendidikan Nasional	38
3. Sistem Pendidikan Luar Sekolah	40
B. Analisis Sistem Pendidikan Luar Sekolah ..	43
1. Row Input	43
2. Instrumental Input	44
3. Environmental Input	50
4. Proses Belajar	51
5. Output	53
C. Pengembangan Program Belajar Pendidikan Luar Sekolah	55
1. Pendekatan Andragogi	55
2. Prosedur Pengembangan Program Belajar Pendidikan Luar Sekolah	57
DAFTAR BACAAN	73

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 PROSES PEMANDIRIAN DALAM SISTEM SOSIAL ..	7
Gambar 2 SISTEM DAN KOMPONENNYA	36
Gambar 3 SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL	39
Gambar 4 SISTEM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH	40
Gambar 5 PENATAAN TEMPAT DUDUK YANG MEMPENGARUHI AKTIVITAS KEGIATAN BELAJAR	60
Gambar 6 HIRARKHI TUJUAN PENDIDIKAN	66

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 DIMENSI-DIMENSI PROGRAM PLS DALAM RANGKA PEMANDIRIAN	32
Tabel 2 PERBANDINGAN KARAKTERISTIK KOMPONEN SIS- TEM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN SEKOLAH	41
Tabel 3 CONTOH CARA MENETAPKAN KEBUTUHAN BELAJAR	64

I. PENDAHULUAN

Memperhatikan tujuan pembangunan nasional Indonesia yang dirumuskan dalam GBHN, terlihat bahwa tujuan yang hendak dicapai ialah mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata spiritual dan material. Sedangkan pada bagian akhir dari GBHN tercantum pernyataan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tergantung pada partisipasi seluruh rakyat, serta sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara serta seluruh rakyat Indonesia.

Para wakil rakyat yang duduk dalam MPR menyadari betul pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan tersebut. Akan tetapi, melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukanlah pekerjaan yang mudah. Berbagai kondisi, baik dari pemerintah (penggerak pembangunan) maupun dari masyarakat itu sendiri kurang memberikan peluang untuk tumbuhnya partisipasi tersebut. Dari pihak pemerintah, menurut Soedjatmoko (1985) terlihat kebiasaan-kebiasaan dari para pegawai berupa kebiasaan-kebiasaan yang mematikan kreatifitas. Kebiasaan-kebiasaan yang menganggap bahwa rakyat adalah oebjek pembangunan, kebiasaan memandang masyarakat--terutama masyarakat desa--sebagai orang bodoh. Akibat dari kebiasaan-kebiasaan yang demikian tidak merangsang timbulnya motivasi dari dalam, tetapi menimbulkan ketergantungan. Sehingga rakyat beranggapan bahwa pembangunan adalah tanggung jawab pemerintah, mereka cenderung menunggu turunnya proyek pembangunan.

Sedangkan dari pihak masyarakat sendiri, terdapat berbagai sikap mental yang menghambat tumbuhnya partisipasi dengan subur. Konetjaraningrat (1987) merumuskan beberapa bentuk sikap mental yang menghambat pembangunan di Indonesia, baik yang merupakan akibat dari penjajahan maupun yang merupakan efek sampingan dari revolusi dalam

merebut kemerdekaan. Di antara sikap mental tersebut ialah: (1) Sikap mental petani, yakni sikap mental yang puas dengan hidup apa adanya. Bagi mereka hidup adalah hari ini, tanpa orientasi untuk kehidupan hari esok yang lebih baik; (2) Sikap mental priyayi, yakni sikap mental yang memandang hakekat hidup adalah buruk dan untuk menghindari kesulitan mereka mencoba untuk lari ke kebatinan dan menyembunyikan diri dalam impian-impian tentang masyarakat yang sempurna dan kehidupan yang berbahagia. Hakekat hidup bagi mereka adalah untuk mencapai kedudukan, hingga mereka sangat berorientasi pada orang-orang yang berpangkat tinggi, yang senior dan orang-orang tua. Akibat dari orientasi yang demikian ialah matinya hasrat untuk berdiri sendiri, rendahnya disiplin dan tanggung jawab; (3) Sikap mental yang tidak percaya pada diri sendiri, penuh keragu-raguan. Jika disimpulkan, maka semua sikap mental tersebut menggambarkan ketidakmandirian, tidak percaya pada diri sendiri, tidak mau dan tidak mampu bertanggung jawab--sikap mental yang demikian lebih banyak terdapat dalam masyarakat desa. Dengan kondisi yang demikian, jelas sulit untuk mengharapkan tumbuhnya partisipasi. Sedangkan kunci keberhasilan pembangunan menurut para wakil rakyat di MPR dan para ahli serta pengamat pembangunan terletak pada partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan itu, maka Kindervatter (1979) mengemukakan bahwa untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, langkah pertama yang harus ditempuh ialah memandirikan masyarakat, yakni meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menggunakan, memanfaatkan, mengembangkan, memilih, merawat, dan mengganti berbagai program pembangunan atas kekuatannya. Persoalannya sekarang ialah bagaimana memandirikan masyarakat tersebut. Menurut Koentjaraningrat (1987) banyak orang yang mengajukan pertanyaan yang demikian kepadanya. Koentjaraningrat menyadari bahwa tidak mudah untuk menjawab pertanya-

an yang demikian, karena menurutnya hal tersebut bukanlah menjadi keahliannya, akan tetapi merupakan pertanyaan yang harus dijawab oleh ahli pendidikan, ahli komunikasi dan media massa, serta ahli psikologi massa.

Memperhatikan apa yang dikemukakan oleh Koentjara - ningrat tersebut, jelas kiranya bahwa pemandirian merupakan bidang garapan dunia pendidikan. Akan tetapi, dunia pendidikan dewasa ini ternyata belum mampu menjawab tantangan yang demikian. Surakhmad (1977) mengemukakan bahwa gerakan pendidikan sudah mulai tidak sinkron dan gejala-gejala kegagalan sudah mulai tampak. Pendidikan, khususnya pendidikan persekolahan hanya mampu bertugas melembagakan nilai-nilai kehidupan yang diragukan kegunaannya yang hanya akan menyuburkan polarisasi sosial dan ketergantungan mental yang sudah mulai nampak dalam produk sistem pendidikan dewasa ini. Polarisasi terlihat dari perbedaan yang mencolok antara golongan yang amat "tersekolah" dan golongan yang tidak mempunyai kesempatan bersekolah secara lebih memadai, semakin banyak warga negara yang terasing dari kehidupan bangsa. Ketergantungan terlihat dari semakin banyaknya warga negara yang kehilangan kemampuan berwiraswasta, produk sekolah cenderung menuntut disediakannya lapangan kerja atau adanya kecenderungan yang tinggi untuk menjadi pegawai, terutama pegawai negeri.

Sehubungan dengan masalah-masalah tersebut, Surakhmad mengemukakan perlunya pencarian strategi baru dalam pembinaan dan pengembangan sistem pendidikan, yakni sistem pendidikan yang dapat dinikmati oleh semakin banyak warga negara dan tidak menimbulkan ketergantungan. Mengingat sifatnya, sekolah memang sulit diharapkan dapat dinikmati oleh semua orang karena penerimaan sasaran didiknya memang dibatasi oleh usia tertentu. Begitu juga sekolah sulit diharapkan bagi proses pemandirian secara maksimal, karena kegiatan belajarnya memang terpusat ke-

pada pengajar. Yang terlebih sulit lagi ialah mengharapkan sumbangan yang lebih besar dari sekolah bagi pemandirian masyarakat desa.

Oleh karena permasalahan-permasalahan tersebut di atas, kiranya pengembangan sistem pendidikan luar sekolah merupakan pilihan yang tepat bagi pemandirian masyarakat desa yang pada gilirannya dapat membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang sekaligus diharapkan pula dapat memecahkan masalah-masalah ketidakmerataan pembangunan dan hasilnya. Berbagai alasan dapat dikemukakan kenapa pendidikan luar sekolah perlu menjadi pilihan bagi pemandirian masyarakat desa, di antaranya: (1) Biayanya yang relatif murah, karena dapat memanfaatkan segala sumberdaya yang tersedia di pedesaan; (2) Sasaran didiknya yang tidak terbatas oleh usia, sehingga memungkinkan semua warga masyarakat desa untuk memperoleh kesempatan pendidikan tersebut dan dapat pula berlangsung sepanjang hidupnya; (3) Sesuai dengan sifatnya, pendidikan luar sekolah memberikan otonomi yang lebih besar kepada warga belajar untuk menentukan kebutuhan dan bentuk kegiatan belajar yang mereka inginkan, karena kegiatan belajar pendidikan luar sekolah memang harus berpusat kepada warga belajar sesuai dengan pendekatan andragogi. Persoalannya menurut Soedomo (1989) ialah bahwa masih banyak penyelenggara kegiatan belajar pendidikan luar sekolah menggunakan pendekatan pendidikan sekolah, sehingga merupakan kegiatan belajar "sekolah" di luar sekolah saja.

Memperhatikan masalah-masalah pembangunan, sekolah, dan pendidikan luar sekolah sendiri, maka buku ini mencoba mengungkapkan apa yang dimaksud dengan pemandirian, di mana saja pemandirian dapat dilaksanakan dan disertai dengan cara-cara yang dapat ditempuh untuk pemandirian tersebut sesuai dengan tempatnya. Selanjutnya, oleh karena pendidikan luar sekolah diharapkan dapat memberikan

sumbangan yang besar bagi proses pemandirian, maka dalam buku ini didiskusikan secara lebih mendalam proses pemandirian dalam pendidikan luar sekolah. Akhirnya dikemukakan pula bagaimana mengembangkan program belajar dalam kegiatan pendidikan luar sekolah sesuai dengan sistemnya, yakni pengembangan kegiatan belajar yang memperhatikan kaedah-kaedah andragogi, bukan sekedar penerapan sistem sekolah di luar sekolah saja.

II. PEMAHAMAN TERHADAP PROSES PEMANDIRIAN

Pada bagian pendahuluan telah dikemukakan bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh partisipasi seluruh rakyat bangsa Indonesia. Selanjutnya telah pula dikemukakan bahwa partisipasi masyarakat akan timbul apabila pembangunan masyarakat mempunyai perhatian yang besar terhadap pengembangan sumberdaya manusia, yakni pengembangan sumberdaya manusia untuk percaya kepada kemampuan dirinya sendiri yang disebut dengan manusia mandiri. Dari manusia mandirilah diharapkan timbulnya partisipasi maksimal. Akan tetapi belum dijelaskan bagaimana sesungguhnya manusia mandiri itu, bagaimana rumusan manusia mandiri, apa yang dimaksud dengan proses pemandirian. Oleh karena itu, untuk dapat memahami proses pemandirian dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia yang merupakan kunci keberhasilan pembangunan, maka dalam bab ini akan dikemukakan pengertian proses pemandirian dan rumusan manusia mandiri. Untuk lebih memperluas dan memperdalam pengertian tentang "manusia mandiri", dalam bab ini juga akan dikemukakan hubungan antara motif berprestasi dengan kemandirian.

A. Pengertian Proses Pemandirian

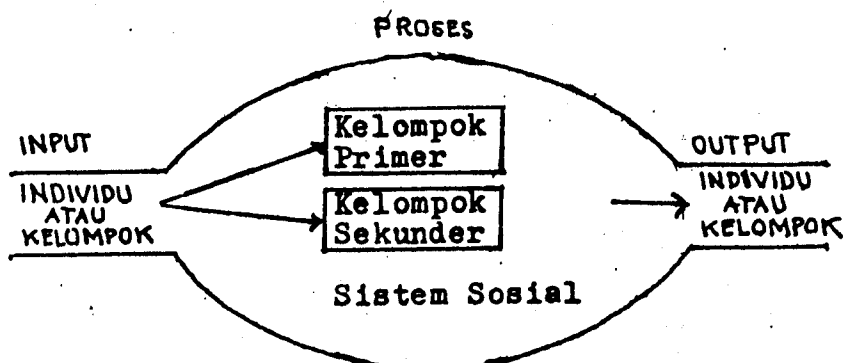
Proses pemandirian berasal dari dua kata, yakni "proses" dan "pemandirian". Menurut makna kamus, kata "proses" berarti urutan perubahan (peristiwa) dalam pengembangan sesuatu, sedangkan kata "pemandirian" berasal dari "mandiri" yang berarti keadaan berdiri sendiri, tidak tergantung kepada orang lain (Depdikbud, 1989). Selanjutnya, kata "mandiri" mendapat imbuhan "pe" dan "an", hal tersebut berarti mengandung suatu usaha untuk membuat seseorang atau masyarakat dapat berdiri sendiri atau tidak tergantung kepada orang lain.

Berdasarkan pengertian kedua kata tersebut, proses

pemandirian dapat dikatakan sebagai suatu usaha untuk merubah seseorang atau kelompok secara perlahan dari tidak mandiri menjadi mandiri, yakni tidak tergantung kepada orang lain dalam pemecahan masalah yang dihadapinya atau dalam pencapaian tujuannya. Sejalan dengan pengertian tersebut, Kindervatter (1979), mendefinisikan proses pemandirian sebagai upaya menumbuhkan dan mengembangkan pengertian individu atau masyarakat tentang kedudukan dalam sosial, ekonomi, dan politik. Berdasarkan pengertian tersebut, dia diharapkan dapat menguasai ketiganya untuk kepentingan hidupnya.

Sebagai suatu usaha untuk memproses, pemandirian memerlukan wadah untuk menumbuhkan dan mengembangkannya. Wadah yang dapat digunakan untuk itu sebenarnya sangat banyak, yakni di mana saja manusia melakukan aktifitasnya, serta berhubungan dengan orang lain dalam suatu sistem sosial. Sistem sosial tersebut dapat dalam bentuk kelompok primer ataupun kelompok sekunder. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan gambar 1

Gambar 1
PROSES PEMANDIRIAN DALAM SISTEM SOSIAL¹⁾



¹⁾ Diadaptasi dari Lerbinger, Otto (1972). Designs for Persuasive Communication. New Jersey: Prentice-Hall.

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa proses pemandirian dapat dilaksanakan di semua tempat di mana manusia melakukan aktifitasnya, misalnya keluarga, warung-warung kopi, kelompok kerja, klub-klub, lembaga pendidikan, masyarakat kota, masyarakat desa, negara, dan bangsa; semenjak dari kelompok primer sampai kepada kelompok sekunder (Ierbinger, 1972). Sebagai suatu sistem, pemandirian dalam suatu sub-sistem akan mempengaruhi kemandirian seseorang dalam sub-sistem sosial lainnya, dan bahkan akan mempengaruhi kemandirian seseorang dalam seluruh sistem, seperti yang digambarkan dalam gambar 1. Proses pemandirian dalam suatu masyarakat tidak selalu linear, dia dapat saja merupakan siklus. Hal tersebut dimungkinkan karena masyarakat selalu berubah dan tantanganpun selalu berubah, sehingga orang perlu belajar secara terus menerus untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya secara mandiri sesuai dengan perubahan zaman.

Kembali pada usaha memproses pemandirian, setiap orang dalam kehidupannya selalu keluar-masuk dari suatu sub-sistem sosial kepada sub-sistem sosial lainnya. Dapat diasumsikan, bahwa tidak semua sub-sistem sosial memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mengembangkan kemandiriannya. Selanjutnya, meskipun seorang telah memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemandiriannya dalam berbagai sub-sistem sosial, tapi karena manusia adalah makhluk yang dinamis, selau berubah dan berkembang, maka dia selalu menghadapi tantangan baru yang memerlukan belajar secara terus menerus untuk menguasai dan mengatasi tantangan tersebut. Selain dari pada itu, dalam perjalanan hidupnya, manusia dihadapkan kepada lapangan kehidupan baru, baik itu lingkungan sosial, pendidikan, atau pekerjaan; semuanya itu memerlukan proses belajar untuk dapat menguasai segala situasi secara mandiri. Dapat diasumsikan bahwa secara lambat laun orang akan dapat menguasai

secara mandiri. Akan tetapi, di samping tidak ada kepastiannya tentang hasil kemandirian yang diperolehnya, kemandirian tersebut sering terlambat datangnya. Untuk memastikan dan mempercepat perolehan hasil yang dimaksud, diperlukan suatu usaha, campur tangan, baik dengan menciptakan wadah yang memungkinkan ataupun dengan mempergunakan wadah yang tersedia dengan sedemikian rupa. Usaha yang demikianlah yang disebut dengan proses pemandirian.

B. Rumusan Kemandirian

Banyak rumusan yang dikemukakan orang dalam hal kemandirian. Namun dalam tulisan ini dikemukakan dua rumusan yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan acuan. Pertama rumusan kemandirian yang dikemukakan Kantor Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup seperti yang dikutip oleh St. Sularto (1990), terdiri dari lima komponen: (1) Bebas, dalam arti tumbuhnya tindakan atas kehendak sendiri dan bukan karena orang lain, bahkan tidak tergantung kepada orang lain; (2) Progresif dan ulet, seperti tampak pada usaha mengejar prestasi, penuh ketekunan, merencanakan dan mewujudkan harapannya; (3) Berinisiatif, yang berarti mampu berfikir dan bertindak secara rasional, kreatif dan penuh inisiatif; (4) Pengendalian diri dari dalam, adanya kemampuan mengatasi masalah yang dihadapi, mampu mengendalikan tindakan serta kemampuan mempengaruhi lingkungan atas usahanya sendiri; dan (5) Kemantapan diri, mencakup aspek percaya pada diri sendiri dan memperoleh kepuasan atas usahanya sendiri.

Rumusan lain tentang kemandirian adalah seperti dirumuskan oleh Soenarwan (tanpa tahun) yang mencakup enam komponen, tiap komponen dijabarkan, lebih lengkap jika dibandingkan dengan rumusan Kantor Menteri Kependu-

kan dan Lingkungan Hidup. Rumusan tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, pengendalian diri. Dalam batasan konsep, pengendalian diri dapat diartikan kemampuan individu dalam mengendalikan perasaannya terhadap permasalahan yang terjadi, baik dalam dirinya sendiri maupun di lingkungannya. Secara operasional pengendalian diri diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk berusaha memandang, memutuskan dan bertindak dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapinya berdasarkan pertimbangannya sendiri. Semua keputusan pada dasarnya terletak pada tangannya sendiri.

Kedua, merumuskan tujuan. Keputusan untuk berbuat guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan mestilah berasal dari dirinya sendiri. Perumusan tujuan adalah merupakan hasil dari keyakinannya bahwa dia mampu menguasai dirinya sendiri dan lingkungannya yang merupakan hasil dorongan dari dalam dirinya pula.

Ketiga, meningkatkan aktivitas. Dalam rangka berusaha untuk mencapai tujuan, dia selalu pula berusaha meningkatkan aktivitasnya. Dorongan untuk meningkatkan aktivitas tersebut pun berasal dari dalam dirinya.

Keempat, melihat kenyataan. Melihat kenyataan dapat didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk mengetahui posisinya dalam lingkungannya dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang menguntungkan dan kemungkinan yang tidak menguntungkan. Hal tersebut berarti sebagai kemampuan untuk mengenal bermacam permasalahan yang dihadapinya serta menentukan cara yang layak untuk pemecahan masalah yang dihadapinya dalam rangka mencapai tujuan yang telah dirumuskannya. Manifestasi dari kemampuan melihat kenyataan antara lain: (1) Kemampuan seseorang mengetahui sebab dan akibat dari keterlibatannya dalam suatu situasi. Harapan dan aspirasinya muncul berdasar -

kan pemahaman terhadap diri dan lingkungannya sendiri. Berdasarkan itu pula dia menyusun rencana dan berusaha untuk mewujudkannya dengan konsekuen; (2) Kemampuan seseorang untuk menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari masyarakatnya. Berdasarkan kesadaran tersebut, dia sanggup untuk saling berbagai perasaan dengan orang lain; (3) Bersedia bertukar pikiran dengan orang lain, dan menerima pikiran orang lain setelah mempertimbangkan bahwa pikiran orang lain tersebut lebih banyak kebenarannya daripada apa yang dipikirkannya; (4) Sejalan dengan kesediaan untuk bertukar pikiran dengan orang lain, dia juga mau dan mampu untuk bekerjasama dengan orang lain; (5) Menerima saran para ahli, hal ini merupakan wujud dari pengakuan bahwa seseorang mungkin lebih mengetahui tentang suatu hal sesuai dengan bidang keahliannya; (6) Patuh terhadap hukum yang berlaku dan menghormati peranan seseorang sesuai dengan kedudukannya; (7) Menerima kenyataan bahwa dalam setiap usaha akan selalu ada rintangan, baik berasal dari diri sendiri maupun dari lingkungan, akan tetapi dia berusaha untuk mengatasi rintangan tersebut; (8) Bersedia menerima hukuman dan sanksi sosial yang merupakan konsekuensi logis atau resiko dari keputusan dan tindakannya; (9) Menempuh cara yang layak untuk mengatasi segala hambatan yang dihadapinya; dan (10) Mempersiapkan ancap-ancang untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang.

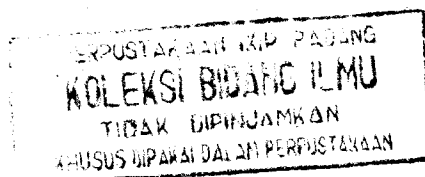
Kelima, tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi dapat didefinisikan sebagai kesediaan seseorang untuk bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya dalam rangka mencapai tujuannya, kepuasannya, ataupun dalam rangka pemecahan masalah yang dihadapinya. Tanggung jawab pribadi juga merupakan kesediaan untuk memikul tanggung jawab sosial terhadap orang lain, kelompok atau masyarakat. Manifestasi dari tanggung jawab pribadi mencakup: (1) Memperlihatkan ke-

kesediaan seseorang untuk memikul tanggung jawab atas segala resiko dari perbuatannya. Dengan kesediaan tersebut dia pun berusaha untuk mengetahui kekeliruannya dan berusaha untuk memperbaikinya; (2) Berusaha untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskannya dengan usaha sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain; (3) Bersedia dan berusaha untuk menemukan cara-cara baru guna memecahkan masalah jika cara yang sudah dirumuskan ternyata memerlukan perubahan; (4) Merasakan kesulitan yang dirasakan orang lain, mempunyai kepedulian terhadap penderitaan orang lain, sehingga dia mau membantu orang yang menderita; (5) Memperlihatkan kecemasan atau kegelisahan orang lain; (6) Memberikan maaf kepada orang lain; (7) Bersahabat dengan orang lain; dan (8) Mengakui kesalahan bial merasa telah terlanjur berbuat salah.

Keenam, kemantapan diri. Kemantapan diri dapat didefinisikan sebagai kepercayaan seseorang akan kemampuannya sendiri untuk memperoleh keberhasilan. Akan tetapi, kepercayaan dirinya tersebut bukanlah membuatnya merasa super, melainkan membuatnya berusaha untuk mengaktualisasikan kemampuan dirinya untuk meraih sukses.

C. Motif Berprestasi dan Kemandirian

Teori motif berprestasi (need for achievement) berasal dari Mc Clelland, seorang psikolog yang mengkaji pertumbuhan ekonomi dari sudut pandangan psikologi (Soedomo, 1989/1990). Dalam penelitian jangka panjang yang dilakukan oleh Mc Clelland terhadap motif berprestasi dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi, dia memperoleh kesimpulan, bahwa motif berprestasi merupakan suatu hasrat untuk melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, bukan untuk memperoleh penghargaan atau prestise, melainkan untuk memperoleh kepuasan dalam dirinya sendiri. Berdasarkan motif yang demikian, orang cenderung be-



kerja lebih keras, belajar lebih cepat, dan melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya jika pekerjaan yang dihadapkannya menantang prestasi. Sebaliknya, orang dengan motif berprestasi tidak akan terangsang untuk bekerja dengan lebih keras dan lebih baik jika dirangsang dengan intensif khusus seperti uang, kedudukan, mitra kerja yang ahli, dan sebagainya.

Selanjutnya Mc Clellan (1961) mengemukakan ciri-ciri dari orang-orang yang memiliki motif berprestasi. Pertama, berani mengambil resiko dari setiap pekerjaan yang dipilih atau dipercayakan kepadanya. Keberanian tersebut bukanlah karena rasa hormatnya kepada orang yang mempercayakan suatu pekerjaan kepadanya dan bukan pula berdasarkan spekulasi terhadap pekerjaan yang dipilihnya. Dia berani mengambil resiko berdasarkan perhitungan, dengan pertimbangan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Jika ternyata bahwa keputusan yang diambilnya untuk melakukan sesuatu memang menguntungkan, dia merasa puas atas keberhasilannya yang berdasarkan langkah-langkah pilihannya sendiri.

Kedua, bekerja dengan penuh semangat dan kreatif. Meskipun demikian, orang yang bermotif berprestasi, tidak selalu bekerja keras dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya. Orang yang memiliki motif berprestasi kelihatannya hanya akan bekerja keras jika pekerjaan tersebut dapat mendatangkan prestasi pribadi atau dengan kata lain dia hanya akan bekerja keras jika kemungkinan keberhasilan pekerjaan tersebut lebih banyak tergantung pada prestasi atau kemampuan pribadinya. Selain dari pada itu, mereka akan bekerja keras dalam tugas-tugas yang menuntut keahlian, pembaruan, atau pemecahan masalah. Sebaliknya, mereka jarang mau bekerja keras untuk tugas-tugas yang bersifat rutin.

Ketiga, memiliki tanggung jawab pribadi. Meskipun orang yang memiliki motif berprestasi mencari kepuasan

dalam keberhasilan kerjanya, mereka pun bersedia menjadi tumpuan kesalahan jika pekerjaan tersebut mengalami kegagalan. Mereka selalu percaya akan kemampuan dirinya untuk berkarya dengan lebih baik dan lebih keras dalam persaingannya dengan orang lain. Seterusnya, mereka tidak begitu tertarik pada pujian masyarakat terhadapnya, mereka merasa mampu untuk menilai keberhasilan kerjanya sendiri.

Keempat, mempunyai pengetahuan berkenaan dengan keberhasilan keputusan dan tindakan yang telah diambilnya. Oleh karena itulah maka dia lebih mengutamakan penilaiannya sendiri terhadap pekerjaannya. Selanjutnya, oleh karena dia mampu menilai pekerjaannya sendiri, maka dia lebih mengutamakan mutu dari keberhasilan pekerjaannya.

Kelima, lebih menyenangi pekerjaan kewira-usahaan. Menurut orang yang memiliki motif berprestasi, pekerjaan yang paling bermartabat adalah pekerjaan yang mengandung resiko yang dapat diperhitungkan.

Selain dari mengemukakan ciri-ciri dari motif berprestasi, penemuan terpenting dari Mc Clelland adalah, bahwa motif berprestasi bukanlah merupakan bawaan. Temuan yang demikian mematahkan dalil psikologik yang mengemukakan bahwa beberap ras tertentu lebih energik dari ras yang lainnya. Hal tersebut terbukti dari hasil penelitian, bahwa motif berprestasi dapat diperoleh anak-anak pada usia sekitar 8 - 10 tahun, sebagai hasil dari cara mendidik orang tua mereka. Latihan-latihan kemandirian dapat meningkatkan motif berprestasi.

Berkenaan dengan cara-cara pendidikan orang tua, Mc Clelland mengemukakan bahwa keluarga memegang peranan kunci dalam peningkatan motif berprestasi. Oleh karena itu, keluarga perlu berupaya menciptakan suasana keluarga yang menumbuhkan keberanian dan kesanggupan untuk mengambil resiko. Keluarga yang otoriter dan memberikan perlindungan yang berlebihan justru mematikan tumbuhnya

motif berprestasi.

Dalam hubungannya dengan proses pemandirian, penemuan terpenting dari Mc Clelland yang perlu digaris bawahi ialah bahwa motif berprestasi bukanlah bawaan dan motif berprestasi tersebut dapat ditumbuhkembangkan melalui pendidikan, serta ras-ras tertentu tidak mempunyai kelebihan energik jika dibandingkan dengan ras lainnya. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian Mc Clelland tersebut, dapat ditegaskan bahwa motif berprestasi atau kemandirian dapat dan mungkin ditumbuhkembangkan di Indonesia. Pada dasarnya, semua tempat--tidak hanya terbatas dalam pendidikan keluarga saja--dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkembangkan kemandirian, sebagaimana dikemukakan dalam bagian terdahulu. Namun demikian, pada bab berikut akan dikemukakan beberapa tempat yang potensial bagi proses pemandirian.

III. BEBERAPA TEMPAT YANG POTENSIAL BAGI PROSES PEMANDIRIAN

Meskipun proses pemandirian dapat dilaksanakan dalam berbagai tempat hidup dan kehidupan manusia, akan tetapi beberapa tempat kiranya perlu mendapatkan perhatian lebih karena potensialnya, yakni kelompok, lembaga kerja dan lembaga pendidikan. Kelompok perlu mendapat perhatian dalam proses pemandirian karena pada dasarnya manusia hidup dari satu kelompok ke dalam kelompok lainnya sepanjang hidup mereka. Sedangkan lembaga kerja adalah merupakan suatu tempat yang mau tidak mau harus dimasuki setiap orang dewasa. Yang teramat vital bagi proses pemandirian ialah lembaga pendidikan, karena pada dasarnya perhatian utama yang harus diberikan dalam lembaga pendidikan ialah bagaimana memandirikan sasaran didiknya agar mampu hidup bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan terhadap orang lain. Berikut ini akan dikemukakan proses pemandirian pada ketiga tempat tersebut.

A. Proses Pemandirian dalam Kelompok

Proses pemandirian dalam kelompok ialah usaha yang dilakukan oleh pimpinan kelompok untuk menumbuhkembangkan kemandirian, baik kemandirian anggota kelompok maupun kelompok itu sendiri secara utuh. Dalam rangka menumbuhkembangkan kemandirian tersebut, Kindervatter (1979) mengemukakan bahwa ada tiga hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pimpinan, yakni peranan pemimpin, perbedaan harapan antara pemimpin dengan anggota kelompok, dan sifat-sifat dari suatu kelompok.

Pada tahap awal "orang luar" dapat memainkan peranan sebagai pimpinan kelompok dalam rangka memandirikan kelompok dan anggotanya dalam suatu sistem sosial, agar mereka dapat melakukan kontrol terhadap lingkungan sosial, politik dan ekonominya demi kesejahteraan hidup mereka. Selanjutnya secara bertahap, dia harus berusaha untuk mengalihkan kepemimpinannya secara nyata kepada

kelompok itu sendiri. Siapapun yang menjadi pimpinan suatu kelompok, suatu hal yang harus disadarinya ialah bahwa peranannya sebagai pimpinan kelompok bukanlah untuk memecahkan segala permasalahan yang dihadapi oleh kelompok, melainkan untuk membantu kelompok dan anggotanya untuk mau dan mampu memikirkan keadaan diri dan lingkungannya.

Sementara pimpinan kelompok berusaha untuk merangsang kelompok dan anggotanya untuk mau dan mampu memikirkan dirinya sendiri, pimpinan kelompok harus berusaha untuk meningkatkan aktifitas mereka. Peningkatan aktifitas tersebut dilakukan dengan menciptakan suasana yang memungkinkan anggota untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan dalam rangka pengembangan kemampuannya, baik motorik maupun secara intelektual. Dalam peningkatan aktifitas tersebut pimpinan kelompok dapat memainkan peran sebagai: (1) Perantara, yakni menghubungkan kelompok baik dengan individu atau kelompok lain di luar kelompoknya; (2) Memberikan penjelasan apabila diperlukan; (3) membimbing kelompok dan anggota dalam setiap aktifitas mereka; (4) Mengarahkan kegiatan kelompok sesuai dengan tujuan; (5) Melakukan penilaian terhadap kegiatan kelompok bersama-sama dengan anggota kelompok.

Selain berhati-hati dengan peranannya, seorang pimpinan kelompok haruslah mampu untuk memahami perbedaan harapan antara dirinya dengan anggota kelompok. Biasanya perbedaan pendapat antara pimpinan dan anggotanya terletak dalam hal proses dan tujuan (hasil). Dalam rangka menumbuh-kembangkan kemandirian, seorang pimpinan kelompok harus lebih berorientasi kepada proses daripada tujuan. Oleh karena itu, seorang pimpinan kelompok tidak seharusnya bertindak sebagai seorang dokter, begitu ada gejala penyakit dia langsung berusaha untuk mengobatinya sendiri. Pimpinan kelompok seharusnya berusaha untuk merangsang anggotanya guna mau dan mampu memecahkan masalah

yang mereka hadapi.

Selanjutnya seorang pimpinan kelompok perlu memperhatikan sifat-sifat kelompok yang dipimpinnya. Meski pun kelompok yang dipimpinnya adalah kelompok sekunder, kelompok tersebut pada dasarnya juga bertingkat-tingkat, semenjak dari kelompok diskusi, kelompok minat, kelompok yang sengaja diorganisir untuk pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh suatu masyarakat, sampai kepada kelompok yang sangat terorganisir dan terstruktur dengan ketat. Untuk masing-masing kelompok tersebut tentu berbeda pendekatan yang digunakan dalam rangka proses pemandirian. Meskipun demikian, menurut Kindervatter, ada beberapa strategi umum yang dapat ditempuh dalam memandirikan suatu kelompok, sebagai berikut:

- a. Berusaha mengembangkan kemampuan kelompok sendiri melalui pembentukan dasar-dasar organisasi kelompok dan memperkuat persatuan kelompok itu sendiri.
- b. Mengembangkan struktur kelompok berdasarkan kondisi yang terdapat dalam kelompok itu sendiri.
- c. Memulai pemandirian kelompok berdasarkan minat kelompok itu sendiri.
- d. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu dalam berbagai kegiatan kelompok.
- f. Pemandirian tidak menekankan pada pencapaian tujuan (hasil), jangka pendek, tetapi mengaktifkan kelompok dan anggotanya untuk mencapai tujuan jangka panjang.

B. Pemandirian dalam Lembaga Kerja

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa untuk menumbuhkan kemandirian dalam suatu lembaga kerja ialah dengan menciptakan suasana demokratis. Sebab dalam suasana demokratislah karyawan mau dan mampu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya guna meningkatkan mutu pekerjaannya. Wujud dari suasana demokratis terse-

but dapat berupa kesediaan pimpinan lembaga kerja untuk berbagi kekuasaan dengan para karyawannya, yakni dengan menerapkan manajemen terbuka. Penerapan manajemen terbuka terutama ditujukan kepada kemampuan karyawan untuk mengawasi dirinya sendiri dan bekerjasama baik dengan pimpinan sendiri maupun dengan sesama karyawan.

Penelitian-penelitian yang dilaksanakan dalam berbagai lembaga kerja demokratis--terutama pabrik dan perusahaan--menunjukkan bukti bahwa dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengawasi dirinya sendiri mempengaruhi peningkatan jumlah dan kualitas produksi. Sejalan dengan itu, jika dibandingkan produktifitas karyawan dengan penerapan manajemen tersentralisasi dan desentralisasi, ternyata tingkat produktifitas karyawan dengan manajemen desentralisasi lebih tinggi daripada dengan manajemen tersentralisasi. Selain daripada itu juga dilaporkan bahwa karyawan yang diberikan kesempatan untuk mengawasi dirinya sendiri dapat merasakan kepuasan kerja (Kindrvatter, 1979).

Oleh karena pemberian kekuasaan kepada para karyawan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas produksi serta memberikan kepuasan kerja kepada karyawan sendiri, hal tersebut berarti menguntungkan kedua belah pihak, yakni karyawan dan perusahaan (lembaga kerja). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kiranya pantas dan seharusnya lah setiap lembaga kerja mengusahakan terciptanya kondisi yang memungkinkan setiap karyawan untuk mau dan mampu mengawasi dirinya sendiri dalam rangka penumbuhan kemandirian.

Selain dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengawasi dirinya sendiri, selanjutnya Kinder-vatter juga mengemukakan bahwa pemandirian dapat ditumbuhkan melalui kerjasama antar anggota dalam kelompoknya. Pentingnya kerjasama ini didasari kesadaran bahwa betapa

pun spesifiknya pekerjaan yang ditugaskan kepada seseorang dia tetap merupakan suatu hal yang kompleks dan mempunyai saling keterkaitan dengan bidang lainnya. Hal tersebut dikarenakan pekerjaan karyawan merupakan suatu sistem, betapapun spesifiknya suatu bagian (komponen), sebagai suatu komponen sistem tentu dia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kerja secara keseluruhan.

Kerjasama yang dimaksudkan di sini bukanlah berarti bahwa seorang karyawan dapat dengan begitu saja melimpahkan tanggung jawabnya kepada orang lain, tetapi karyawan menyadari bahwa keberhasilan kerjanya juga mempengaruhi keberhasilan kerja karyawan lainnya. Hal tersebut berarti memberikan kesadaran kepada setiap karyawan bahwa dirinya mempunyai arti bagi keberhasilan orang lain (koleganya), sehingga membangkitkan harga dirinya proses pemandirian. Hal tersebut dikarenakan dalam kerjasama setiap karyawan memperoleh kesempatan untuk saling bertukar pendapat; berinteraksi dalam kelompok berdasarkan keadilan dan kejujuran; dan kerjasama yang diberikan kepada karyawan lain berdasarkan kepedulian terhadap kesulitan yang dihadapi oleh orang lain.

Memperhatikan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa suasana yang demokratis dalam suatu lembaga kerja dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengawasi dirinya sendiri dan bekerjasama memberikan keuntungan baik kepada perusahaan maupun kepada karyawan sendiri, serta dapat pula menumbuh-kembangkan kemandirian. Oleh karena itu pantas dan sewajarnya setiap lembaga kerja berusaha menciptakan suasana demokratis dalam sistem manajemennya. Kindervatter mengusulkan enam komponen yang perlu diperhatikan dalam sistem manajemen yang demikian. (1) Memberi kesempatan kepada karyawan untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan kepu-

tusan, sehingga mereka merasa bahwa keputusan yang telah diambil tersebut merupakan keputusan mereka sendiri; (2) Memberikan penghargaan kepada setiap karyawan yang memperlihatkan peningkatannya kualitas kerjanya, baik dengan memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan maupun dengan memberikan peningkatan penghasilan; (3) Memberikan kesempatan yang sama dalam situasi yang sama kepada setiap karyawan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, atau pun keahliannya; (4) Memberikan jaminan terhadap terpeliharanya hak-hak individu; (5) Membentuk suatu dewan yang independent untuk membantu menyelesaikan perselisihan antara karyawan dengan pimpinannya; dan (6) Merumuskan seperangkat aturan yang memungkinkan tumbuhnya sikap partisipatif di antara para pekerja.

C. Pemandirian dalam Lembaga Pendidikan

Sesuai dengan sistem pendidikan yang dianut di Indonesia, kita mengenal dua jalur penyelenggaraan pendidikan, yakni jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan luar sekolah mencakup pendidikan yang diselenggarakan di dalam keluarga. Berdasarkan jalur penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dilihat bahwa lembaga penyelenggaraan pendidikan dapat dibedakan pada lembaga pendidikan sekolah, pendidikan luar sekolah dan pendidikan keluarga. Pada dasarnya setiap lembaga pendidikan berkewajiban untuk mengupayakan terciptanya suasana yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya kemandirian sasaran didiknya. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, terutama dalam rangka menumbuhkan manusia-manusia yang mampu membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa. Akan tetapi, sesuai dengan sifat masing-masing lembaga, setiap lembaga pendidikan tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam proses pemandi-

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

rian. Berikut dalam bagian ini akan didiskusikan secara sepintas persoalan proses pemandirian dalam lembaga pendidikan sekolah dan pendidikan keluarga. Sedangkan proses pemandirian dalam lembaga pendidikan luar sekolah akan didiskusikan dalam bagian tersendiri.

1. Pemandirian dalam Lembaga Pendidikan Sekolah

Bewasa ini banyak kritik yang ditujukan kepada sekolah, di antaranya Abdurrahman Wahid (1984) mengemukakan bahwa pendidikan (yang dimaksud sekolah) kehilangan relevansinya bagi sebagian besar warga bangsa-bangsa di dunia ketiga, kecuali sebagai proses pemberian status sosial tersendiri, sebagai "warga yang pernah sekolah". Dengan ungkapan lain dapat dikatakan bahwa pendidikan, terutama bertumpu pada sistem sekolah, menjadi suatu yang asing bagi masyarakat, terutama jika dihubungkan dengan pemandirian. Pendidikan untuk menghasilkan petani yang mandiri, usahawan kecil yang berwadaya, dan pengrajin yang dapat bersaing dengan barang impor boleh dikatakan tidak pernah tercapai. Kritikan lain yang ditujukan kepada dunia sekolah dilontarkan Pranoto (1990) bahwa sekolah tidak dapat menjawab tantangan pembangunan yang memerlukan manusia-manusia yang mandiri dan bermental tangguh. Hal tersebut dikarenakan sekolah hanya memberikan pelajaran yang mengutamakan intelektual dan bermuara pada ijazah, tetapi tidak memberikan keterampilan-keterampilan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan kehidupan. Akibatnya, out put sekolah tidak dapat menjadi manusia yang mandiri, manusia yang mampu menciptakan lapangan kerja; melainkan menjadi manusia yang tergantung kepada orang lain (pemerintah) dengan mengandalkan ijazahnya.

Kelemahan yang tampak pada lembaga pendidikan sekolah tersebut lebih banyak disebabkan oleh kelemahan sis-

temnya yang menyebabkan banyaknya ketergantungan. Ketergantungan tersebut dapat diidentifikasi mulai dari kurikulum. Buchori (1990) mengemukakan bahwa kurikulum merupakan wewenang birokrasi dalam perancangannya, segala sesuatunya mengenai kurikulum ditentukan oleh perancang dari pusat. Akibat dari hal yang demikian ialah ketergantungan akan bahan ajaran, sasaran tidak dapat menentukan atau setidaknya tidak mempunyai pilihan yang luas tentang apa yang harus mereka pelajari. Ketergantungan kepada pengajar, hal ini lebih banyak dipengaruhi oleh anggapan yang berlaku umum bahwa guru adalah seseorang yang serba tahu, oleh karenanya sasaran didik tidak didorong untuk menemukan dan memperelajari sendiri apa yang seharusnya mereka pelajari. Sejalan dengan ketergantungan kepada guru, ketergantungan lain ialah ketergantungan waktu belajar, yang lebih banyak berassas dari kebiasaan belajar sasaran didik sendiri, mereka lebih banyak belajar karena akan ada ulangan atau karena adanya tugas (PR) yang diberikan oleh pengajar. Akhirnya dapat pula dikemukakan bahwa pengawasan yang begitu ketat oleh pengajar juga dapat mematikan kemandirian--biasanya hal ini terdapat pada pengajar yang otoriter, pelajar tidak diberi kesempatan untuk berkreasi, semua yang benar adalah kebenaran menurut si pengajar.

Meskipun banyak kritik yang ditujukan kepada sistem sekolah, perlu disadari bahwa kelemahan sekolah terutama memang dituntut oleh sistem sekolah itu sendiri yang memang bersifat formal. Oleh karena itu, masyarakat tidak seharusnya menuntut terlalu banyak kepada sekolah. Untuk itu ada baiknya disimak apa yang dikemukakan oleh Hidayanto dkk (1988), "Kita harus realistis bahwa sekolah bukanlah satu-satunya lembaga pendidikan yang menyiapkan tenaga kerja terampil yang siap pakai".

Walau bagaimanapun, sekolah pada dasarnya masih da-

pat diharapkan berperan dalam proses pemandirian, sebagian karena sistemnya yang memang mendukung terlaksananya proses pemandirian dan sebagian lainnya karena telah diupayakan berbagai pembaruan. Dari sistemnya, terlihat bahwa sistem ujian yang dilaksanakan di sekolah menuntut kemandirian dari pelajar. Dalam ujian seorang pelajar harus menyelesaikan tugas ujiannya sendiri tanpa dapat meminta bantuan dari orang lain. Dalam ujian, seorang pelajar harus mampu menyelesaikan tugas-tugas ujiannya sendiri. Agar seseorang memperoleh hasil belajar yang maksimal melalui ujian, dia harus belajar keras. Selain dari pada itu, pemberian ranking pada setiap penerimaan laporan hasil belajar juga dapat memacu tumbuhnya kemandirian, sebab sesuai dengan sistem ujian, ranking yang diperoleh seorang pelajar adalah gambaran dari hasil kerja kerasnya.

Berkenaan dengan pembaruan-pembaruan yang telah dilaksanakan di sekolah, terlihat bahwa pendekatan baru, misalnya Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) dapat menumbuhkan kemandirian. CBSA memberikan kesempatan kepada pelajar untuk berfikir mandiri, dalam suasana demokratis. Melalui CBSA pelajar tidak semata-mata tergantung kepada pengajar, akan tetapi secara bersama-sama dengan pengajar mereka dapat mengadakan eksplorasi dan menemukan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman baru (Sularto dan Parera, 1990). Pendekatan baru lainnya yang memungkinkan tumbuh-kemandirian secara maksimal di sekolah adalah pendekatan sistem modul, sebab dengan pendekatan sistem modul seorang pelajar dapat memperoleh kemajuan sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri.

Masih berhubungan dengan upaya pemandirian di sekolah, perlu dikemukakan saran Soedjatmoko (1985), bahwa sudah saatnya sekolah untuk meninggalkan budaya yang menganggap bahwa buku teks adalah suatu hal yang sakral

dalam kegiatan belajar. Sekolah harus tanggap dalam menghadapi tantangan zaman yang selalu berubah. Sekolah zaman ini harus berani menghadapi tantangan untuk mengajarkan seni belajar--bukan hanya sekedar mengajarkan apa yang harus diajarkan, tetapi bagaimana menyiapkan pelajar untuk mampu belajar sepanjang hidupnya.

2. Pemandirian dalam Lembaga Pendidikan Keluarga

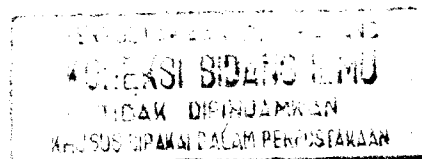
Menurut GBHN pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Sedangkan UU RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah. Tidak dapat diragukan lagi bahwa keluarga mempunyai peranan penting dalam pendidikan, termasuk pendidikan dalam rangka proses pemandirian. Sejalan dengan itu, Ki Hadjar Dewantara (1977: 375) mengemukakan,

. . . di alam-keluarga anak-anak berkesempatan mendidik diri sendiri, karena di dalam hidup keluarga itu mereka tidak berbeda kedudukannya seperti orang hidup di dalam masyarakat, yang seringkali terpaksa mengalami macam-macam kejadian, hingga dengan sendirinya menimbulkan pendidikan bagi diri sendiri itu.

Meskipun demikian, belum tentu dalam semua keluarga akan terlaksana proses pemandirian dengan baik. Sesuai dengan pendapat Mc Clelland (1961), kemandirian dalam keluarga akan sangat tergantung kepada bagaimana pendekatan yang digunakan oleh masing-masing keluarga (orang tua). Dalam keluarga otoriter biasanya proses pemandirian menjadi mandeg, karena anak tidak dibiasakan untuk mengambil keputusan sendiri. Anak akan tertekan dan dalam situasi keterpaksaan untuk mengambil keputusan dia akan mengalami keragu-raguan karena takut salah, sebab dalam keluarga otoriter kebenaran biasanya terletak di tangan orang tua. Hal yang sama juga terjadi dalam keluarga

yang memberikan perlindungan yang berlebihan kepada anak, anak menjadi cengeng dan tidak terbiasa memecahkan masalah yang dihadapinya sendiri. Menghadapi permasalahan kecil saja mereka mengandalkan bantuan orang tuanya. Akhirnya, ketergantungan yang demikianpun mereka bawa ke dalam kehidupannya di masyarakat kelak.

Memperhatikan kondisi pendidikan keluarga yang menghambat proses pemandirian, perlu diupayakan perubahan pada cara mendidik dan mengasuh anak dalam keluarga sedini mungkin, sehingga tercipta kondisi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kemandirian. Jika disimpulkan pendapat Soedomo (1988/1989) dan Lindesmith (1977), maka upaya yang dapat ditempuh untuk menciptakan kondisi yang kondusif tersebut ialah: (1) Memberikan kesempatan kepada anak untuk berkreasi. Hal ini berarti memberikan kebebasan kepada anak dalam batas-batas tertentu untuk melakukan segala sesuatunya berdasarkan pikiran, khayal, atau kemauannya sendiri; (2) Menumbuhkan keberanian. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk menghadapi kesulitan, tantangan, dan bahkan bahaya sekalipun; tanpa segera campur tangan. Jika mereka berhasil memecahkan masalahnya sendiri, sebaiknya diberikan pujian atau penghargaan. Sebaliknya jika mereka mengalami kegagalan atau ditimpa oleh bahaya, itulah saatnya untuk menumbuhkan kesadaran bahwa setiap perbuatan pasti mengandung resiko; (3) Menanamkan rasa tanggung jawab. Upaya menumbuhkan tanggung jawab ini berhubungan dengan upaya penumbuhan keberanian, sebab tanggung jawab berarti berani menerima resiko dari setiap perbuatan yang dilakukan; (4) Memberikan kesempatan untuk belajar dari kesalahan. Hal ini merupakan suatu hal yang teramat penting, sebab setiap orang dalam hidupnya pasti mengalami kesalahan dan kekeliruan. Belajar dari kesalahan juga berarti memberikan kesempatan untuk menilai diri sendiri.



IV. PEMANDIRIAN MELALUI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Sebelum mendiskusikan proses pemandirian dalam lembaga pendidikan luar sekolah (PLS), perlu dikemukakan bahwa PLS yang dimaksudkan di sini adalah program PLS yang terprogram dengan sedemikian rupa. Hal ini perlu dikemukakan untuk membedakannya dengan lembaga pendidikan keluarga, karena dalam Undang-undang RI No. 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur PLS. Oleh karena itu PLS yang dimaksudkan di sini adalah PLS yang diprogramkan dengan sedemikian rupa. Selanjutnya proses pemandirian dalam lembaga pendidikan ini akan dilihat dari dimensi-dimensi programnya.

A. Pembentukan Kelompok Kecil

Pembentukan kelompok dalam PLS haruslah dengan mempertimbangkan jumlah anggota kelompok yang relatif kecil. Solli (1979) mengusulkan jumlah anggota kelompok dalam pendidikan luar sekolah antara 5 - 10 orang. Di samping jumlah anggota kelompok yang relatif kecil, perlu pula dipertimbangkan homogenitas kelompok, setidaknya dalam hal minat. Ada beberapa pertimbangan yang dapat dikemukakan kenapa jumlah anggota kelompok perlu relatif kecil dan homogen, antara lain untuk meningkatkan aktivitas, kerjasama, dan otonomi.

Jumlah anggota kelompok yang terbatas (kecil) memungkinkan setiap anggota kelompok untuk terlibat dalam kegiatan diskusi kelompok secara aktif. Diskusi kiranya mempunyai arti yang penting dalam proses pemandirian. Sebab melalui diskusi warga belajar memperoleh kesempatan untuk berlatih mengemukakan pendapatnya. Jika jumlah anggota kelompok terlalu besar, diskusi dalam kelompok akan didominasi oleh anggota yang memang sudah mempunyai

bawaan aktif juga.

Perlunya keanggotaan kelompok yang relatif homogen, terutama dalam hal minat, berhubungan dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan belajar. Dalam dunia pendidikan luar sekolah, bahan belajar lebih banyak ditentukan oleh hasil mekanisme perencanaan bersama berdasarkan kebutuhan dan minat warga belajar (Soedomo, 1989). Oleh karena itu, jika jumlah anggota kelompok terlalu banyak (besar) akan sulit menyatukan dan memenuhi kebutuhan dan minat belajar yang berbeda-beda antara masing-masing anggota. Jika keadaan yang demikian terpaksa dilakukan berarti menghilangkan kesempatan untuk pemandirian bagi sebagian anggota, sebab mungkin banyak anggota lain yang terpaksa untuk mengikuti kemauan anggota yang lebih dominan meskipun tidak sesuai dengan minat dan kebutuhan belajarnya. Akhirnya dalam keadaan yang demikian akan sulit untuk menciptakan kerja sama dalam kelompok.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami pentingnya jumlah anggota kelompok yang kecil dalam suatu kegiatan pendidikan luar sekolah. Pada akhirnya diharapkan terbentuk suatu kelompok yang mampu mengurus dirinya sendiri dalam suatu bentuk kerjasama berdasarkan minat yang sama yang pada gilirannya melahirkan suatu kelompok yang berotonomi penuh disertai dengan kebanggaan menjadi anggota kelompok.

B. Pengalihan Tanggung Jawab

Sebagaimana dikemukakan terdahulu, bahwa setiap pembangunan memerlukan intervensi, tapi intervensi yang mempunyai kepedulian terhadap pemandirian. Begitu juga halnya dalam penyelenggaraan pendidikan, adanya intervensi dalam penyelenggaraan pendidikan luar sekolah tidak perlu dihindarkan, namun demikian intervensi dari "orang

luar" terhadap kelompok belajar haruslah bersifat sementara. Pada tahap awal "orang luar" dapat saja dan boleh saja berperan lebih aktif demi terselenggaranya pendidikan, akan tetapi demi kemandirian, dominasi "orang luar" sebagai penanggung jawab terselenggaranya pendidikan secara bertahap harus dialihkan kepada kelompok itu sendiri. Hal tersebut mungkin sulit dilakukan, mengingat hubungan yang heterofilius antara "orang luar" dengan warga masyarakat setempat sebagai anggota kelompok (Rogers dan Shoemaker, 1981). Keadaan yang demikian dipersulit lagi oleh sikap mental orang Indonesia yang berorientasi vertikal (Koentjaraningrat, 1987). Untuk mengatasi keadaan yang demikian, maka orang luar yang berminat atau memang bertugas untuk mengelola suatu kelompok belajar, maka dia harus mampu secara perlahan-lahan untuk menurunkan statusnya.

C. Kepemimpinan Warga Belajar

Dalam sistem perskolahan biasanya pendidikan diberikan oleh seorang pendidikan (guru) kepada si terdidik (murid), dalam sistem pendidikan luar sekolah kebiasaan-kebiasaan yang demikian sering terbawakan. Menurut Kindervatter (1979) berdasarkan hasil penelitiannya terhadap beberapa kelompok belajar di Indonesia, hal yang demikian terjadi karena kebanyakan dari para fasilitator berasal atau berlatar belakang sebagai pendidik dalam lembaga pendidikan sekolah. Akibatnya kegiatan belajar terpusat kepada fasilitator, bukan kepada warga belajar itu sendiri. Selanjutnya Kindervatter melaporkan bahwa kelompok-kelompok belajar yang demikian tidak berumur panjang. Begitu proyek berakhir--kelompok-kelompok belajar yang diteliti adalah program pendidikan luar sekolah yang dirancang berdasarkan kerjasama antara Direktorat Pendi-

kan Masyarakat dengan World Education Inc., New York--para petugas meninggalkan lapangan, dalam waktu singkat kelompok-kelompok belajar tersebut pun bubar. Memperhatikan hal yang demikian dapat disimpulkan bahwa tidak semua pelaksanaan pendidikan luar sekolah dapat menjamin terlaksananya proses pemandirian.

Pendidikan luar sekolah yang dapat memandirikan warga belajarnya bukan sekedar pendidikan yang dilaksanakan di luar sekolah, tapi sesuai dengan cirinya khasnya, maka pendidikan luar sekolah yang dapat memandirikan warga belajarnya adalah pendidikan luar sekolah yang setiap kegiatan belajarnya berpusat kepada warga belajar. Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan belajar yang berpusat kepada warga belajar, warga belajar tidak saja harus dilibatkan dalam proses perencanaan kegiatan belajar, tetapi mereka harus diberi kekuasaan yang besar dan luas untuk mengambil keputusan dalam segala aspek organisasi kelompok.

Untuk mengalihkan tanggung jawab kepada kelompok memang bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Tetapi sebagaimana yang dikemukakan pada bagian terdahulu, pengalihan tanggung jawab harus dilakukan secara bertahap dengan melatih warga belajar untuk bertanggung jawab terhadap segala hasil kegiatan belajarnya; latihan tersebut pada tahap awal dapat diberikan dalam bentuk usaha menilai hasil belajar sendiri; berikutnya dengan membentuk tim-tim kerja yang terdiri dari 3 atau 4 dengan menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pimpinan tim. Apabila telah tiba saatnya, pimpinan kelompok diserahkan kepada salah seorang dari anggota kelompok, untuk selanjutnya "orang luar" hanya berperan sebagai fasilitator.

D. "Orang Luar" sebagai Fasilitator

"Orang luar" sebagai fasilitator berarti bahwa yang

bersangkutan harus berperan sebagai orang yang berusaha membantu memperlancar proses belajar. Dalam rangkian membantu memperlancar proses belajar tersebut ada beberapa peran yang dapat dimainkan oleh fasilitator: (1) Membantu terciptanya suasana yang mendukung kelancaran proses belajar. Bantuan menciptakan suasana yang mendukung ini menurut Soedomo (1989) mencakup saran tentang kondisi lingkungan fisik yang menguntungkan, memelihara hubungan yang harmonis antara sesama anggota kelompok dan dengan masyarakat lingkungannya, dan mengemukakan saran tentang bentuk struktur organisasi yang menguntungkan; (2) Membimbing proses belajar. Hal ini menyangkut dengan bagaimana menentukan teknik-teknik belajar yang akan digunakan, mendiagnosa kebutuhan belajar, merumuskan tujuan belajar sesuai dengan kebutuhan belajar, menyusun rancangan kegiatan belajar; (3) Menjadi sumber belajar atau penghubung antara warga belajar dengan sumber belajar yang mereka perlukan; (4) Sebagai penilai keberhasilan belajar. Penilaian hasil belajar oleh fasilitator lebih banyak ditujukan untuk motivasi, sebab warga belajar diharapkan mampu untuk menilai dirinya sendiri agar mereka dapat belajar dari pengalamannya sendiri; dan (5) Berdasarkan kemampuan warga belajar untuk menilai dirinya sendiri, jika warga belajar menghadapi kesulitan belajar yang tidak dapat mereka pecahkan sendiri, fasilitator dapat memberikan bantuannya.

E. Demokratisasi

Proses demokratisasi pada dasarnya berhubungan dengan penciptaan kondisi yang telah dikemukakan terdahulu, hal ini berhubungan dengan persamaan hak dan kewajiban dalam kelompok. Jika terdapat perbedaan pendapat, kebutuhan ataupun minat dalam kegiatan belajar, untuk penetapannya diputuskan melalui konsensus atau diskusi.

Untuk lebih mudah memahami bagaimana karakteristik pendidikan luar sekolah dalam rangka pemandirian ditinjau dari dimensi-dimensi programnya dapat diperhatikan tabel berikut:

Tabel 1

DIMENSI-DIMENSI PROGRAM PLS
DALAM RANGKA PEMANDIRIAN¹⁾

Dimensi Program :	Kebijaksanaan
1	2
Struktur	Berdasarkan kepada aktivitas dan otonomi kelompok kecil. Kelompok dibentuk berdasarkan latar belakang minat yang relatif homogen agar terbentuknya suatu tim kerja yang mempunyai rasa memiliki dan kebanggaan tersendiri terhadap kelompoknya.
Waktu dan Tempat Belajar	Waktu dan tempat belajar ditentukan oleh kelompok belajar sendiri berdasarkan musyawarah secara informal.
Peranan Warga Belajar	Secara bersama-sama menentukan segala aspek program dengan dibantu oleh fasilitator. Siapapun berhak menjadi pemimpin kelompok. Tanggung jawab pribadi diwujudkan dalam kerangka tanggung jawab terhadap kelompok secara utuh. Kelompok secara keseluruhan mempunyai otonomi terhadap kegiatan belajarnya.
Peranan Fasilitator	Mendorong warga belajar untuk memikirkan dirinya sendiri dan kelompok. Membantu memperlancar terlaksananya kegiatan belajar. Secara tidak langsung membantu meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah dan mengajukan

¹⁾ Diadaptasi dari Kindervatter, Suzanne (1979). Non-formal Education as an Empowering Process with Case Studies from Indonesia and Thailand. Massachusetts: Center for International Education University of Massachusetts.

1	:	2
Hubungan antara Warga Belajar dengan Fasilitator		mengajukan pertanyaan yang dapat membantu meningkatkan kemampuan warga belajar untuk menganalisa secara kritis. Selama proses belajar berlangsung diusahakan dua perbedaan penekanan dalam hal hubungan antara fasilitator dengan warga belajar: yakni warga belajar semakin hari semakin meningkatkan aktivitasnya sedangkan fasilitator semakin menurunkan akativitasnya. Hal tersebut dilakukan berdasarkan saling pengertian.
Penilaian Kebutuhan		Kebutuhan belajar dirumuskan berdasarkan minat dan masalah-masalah kehidupan nyata yang dihadapi oleh warga belajar. Kebutuhan tersebut diidentifikasi melalui dialog antara warga belajar sendiri dan antara warga belajar dengan fasilitator.
Pengembangan Kurikulum		Sambil jalan, berkembang, dan terbuka. Hal tersebut mengandung arti bahwa tujuan umum yang perlu dirumuskan terlebih dahulu, sedangkan tujuan khusus dan rencana pelajaran dapat dikembangkan dari suatu kegiatan belajar kepada kegiatan belajar berikutnya.
Pokok Bahasan		Fasilitator membantu menemukan dan menemukan dan mengembangkan permasalahan nyata yang dihadapi oleh warga belajar. Berdasarkan analisis tersebutlah warga belajar menentukan sendiri apa yang ingin mereka pelajari untuk selanjutnya menentukan pula sumber belajarnya. Dengan demikian, topik pelajaran (pokok bahasan) mencakup dua hal: (1) "merumuskan tujuan" yang berhubungan dengan pemecahan masalah kelompok dan (2) materi pelajaran yang berhubungan dengan pemecahan masalah dalam bentuk informasi, keterampilan, atau pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Kedua cakupan tersebut diusahakan dapat diputuskan sendiri oleh warga belajar.

1	:	2
Material		Material yang diperlukan dalam mendukung kegiatan belajar dapat dikembangkan oleh fasilitator bersama dengan warga belajar atau warga belajar sendiri dengan maksud untuk merangsang kemampuan warga belajar dalam mengidentifikasi dan menganalisis masalah dalam rangka meningkatkan kemampuan mengaktualisasikan diri serta mendorong aktivitas kelompok. Material tersebut dapat berupa: type recorder, cerita, buletin kelompok, chart, ceramah singkat, buku teks, booklets, berbagai alat permainan dan sebagainya.
Metoda		Kerja kelompok, diskusi, latihan pengembangan keterampilan, membuat rencana dan melaksanakan proyek. Semuanya itu dirancang dengan tetap memperhatikan kerjasama dan otonomi kelompok.
Penilaian		Warga belajar secara berkesinambungan diminta untuk menilai perkembangan dirinya sendiri dan keuntungan apa yang diperolehnya dalam kehidupan bermasyarakat setelah mengikuti kegiatan belajar, serta diminta untuk mengoreksi sendiri kesalahan, baik kesalahan diri sendiri maupun kesalahan program. Sedangkan kemajuan program dinilai oleh tim penilai melalui kerjasama dengan fasilitator.

V. PENGEMBANGAN SISTEM PLS DALAM RANGKA PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

Berdasarkan diskusi pada bab-bab sebelumnya sampailah kita pada kesimpulan bahwa masalah pokok dari pembangunan masyarakat desa ialah bagaimana membelajarkan masyarakat agar mereka dapat mandiri yang pada gilirannya akan mampu berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan guna mampu membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Permasalahannya sekarang ialah bagaimana membelajarkan masyarakat tersebut dan jalur apa yang paling tepat ditempuh. Berdasarkan diskusi pada bab IV dapat pula diambil kesimpulan bahwa semua jalur pendidikan dapat ditempuh, akan tetapi mengingat keterbatasan lembaga pendidikan sekolah dan kondisi masyarakat desa, perhatian perlu ditujukan kepada pengembangan sistem pendidikan luar sekolah.

A. Pendidikan Luar Sekolah sebagai Suatu Sistem

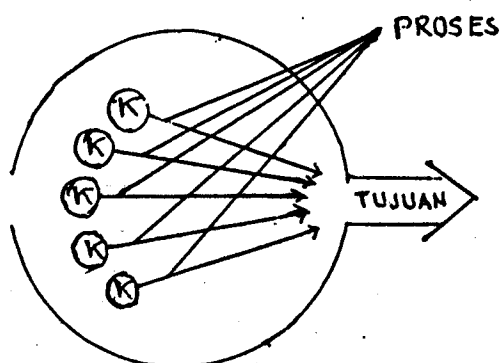
1. Pengertian Sistem

Bila mau memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang ada di alam ini, akan diketahui bahwa hampir tidak ada sesuatu hal yang berdiri sendiri. Ambillah sebuah contoh yang kecil, misalnya, atom adalah suatu sistem yang terdiri dari proton positif yang terletak di pusat yang dkitari oleh elektron negatif dalam keseimbangan yang sempurna, yaitu kekuatan sentripetal yang secara sempurna diseimbangkan oleh kekuatan sentripetal elektostatiknya (Sunarwan, 1991). Contoh yang agak konkrit misalnya meja makan. Meja makan sebagai sistem terdiri dari dua sub-sistem, yakni kursi dan meja. Masing-masing terdiri dari beberapa komponen sistem; kursi terdiri dari kaki, tempat duduk, dan sandarannya sedangkan

meja terdiri dari kaki dan alas atau daunnya. Selanjutnya, dalam ilmu sosial dikenal istilah paradigma yang mengasumsikan bahwa realitas sosial itu bersifat ganda dan kompleks, satu sama lain saling berkaitan sehingga merupakan suatu kesatuan yang bulat.

Lalu, apakah sesungguhnya yang disebut dengan sistem itu? Faisal (1981) mengemukakan bahwa sistem adalah suatu totalitas yang bertujuan, yang tersusun atas komponen-komponen fungsional. Dikatakan sebagai totalitas yang fungsional, karena ia merupakan suatu kesatuan dari komponen-komponen yang fungsinya saling kait-mengkait antara satu dengan yang lainnya. Dikatakan sebagai bertujuan, karena totalitas fungsional tadi memang menuju pada suatu tujuan tertentu melalui suatu proses. Untuk lebih mudah memahaminya, dapat diperhatikan gambar 2.

Gambar 2

SISTEM DAN KOMPONENNYA ¹⁾

K = Komponen

Berdasarkan gambar tersebut dapat diamati bahwa tujuan memberikan arah pada suatu sistem di samping mengarahkan bentuk proses yang harus terjadi. Selanjutnya kom-

¹⁾ Diadaptasi dari Soenarwan (1991). Pendekatan Sistem dalam Pendidikan. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

ponen sistem dapat ditambahkan atau dikurangi asal saja dengan pengurangan dan penambahan tersebut tidak mengganggu efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan. Contoh sederhana dapat dikemukakan kursi sebagai suatu sistem. Jika kursi dimaksudkan sebagai sub-sistem dari meja makan, dia tidak perlu mempunyai tangan, walaupun ada malah akan mengganggu. Sebaliknya, jika dia ditujukan untuk tempat duduk santai, perlu ditambahkan tempat tangan. Bahkan jika kursi tersebut ditujukan sebagai kursi kuliah (tanpa meja), komponennya perlu ditambahkan dengan tempat menulis.

Setelah memahami pengertian sistem, selanjutnya perlu dikemukakan bahwa suatu sistem baru akan mempunyai arti bagi pencapaian tujuan apabila orang mampu mengoperasikan dengan sedemikian rupa, jika tidak mampu mengoperasikannya dengan baik, dia tidak akan mempunyai arti apa-apa dan bahkan mungkin dapat membahayakan. Kemampuan mengoperasikan sistem termasuk juga dalam arti kemampuan mengoperasikan sub-sistem sesuai dengan fungsinya. Contoh ekstrim dapat dikemukakan kembali meja makan yang terdiri dari sub (komponen) sistem kursi dan meja. Jika kursi dijadikan sebagai tempat menghidang, sedangkan meja sebagai tempat duduk, dapat dibayangkan bahwa hal itu tidak membantu mencapai tujuan kenyamanan makan. Walaupun agak ekstrim, hal tersebut dapat dianalogikan bahwa sistem pendidikan luar sekolah ditujukan untuk kredensial atau kemampuan akademis, sedangkan pendidikan sekolah ditujukan untuk menyiapkan tenaga kerja siap pakai.

Sebelum sampai kepada sistem pendidikan, perlu pula dikemukakan bahwa sistem dapat pula dibedakan pada dua bentuk, yakni sistem terbuka dan sistem tertutup. Berkaitan dengan ini, Soenarwan (1991), mengemukakan bahwa sistem terbuka adalah sistem yang memerlukan masukan untuk diproses menjadi keluaran, sedangkan sistem tertutup

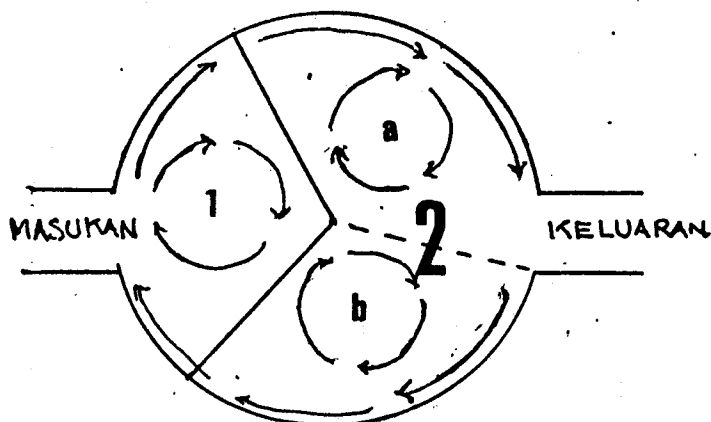
tidak memerlukan masukan dan keluaran. Berkenaan dengan sistem terbuka dapat dicontohkan sistem pembuatan ban mobil yang memerlukan masukan benang, kawat, dan karet; keluarannya ialah ban mobil yang siap pakai. Sistem pendidikan nasional Indonesia adalah sistem terbuka, sebagaimana dikemukakan berikut ini.

2. Pendidikan Luar Sekolah dalam Sistem Pendidikan Nasional

UU RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengemukakan bahwa, "Sistem pendidikan nasional adalah sistem keseluruhan yang terpadu dari semua sistem dan kegiatan pendidikan yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional". Memperhatikan fasal-fasal selanjutnya tidak disebutkan satuan dan jenis pendidikan sebagai suatu sistem, yang disebut adalah istilah jalur. Namun demikian, bila disimak pengertian secara umum, kemudian dihubungkan dengan fasal-fasal yang terdapat dalam UU Sisdiknas, khususnya fasal 10 ayat (1) - (5), terlihat bahwa pada hakekatnya Sisdiknas terdiri dari beberapa sub-sistem. Memperhatikan fasal 10 ayat (1), terlihat bahwa Sisdiknas terdiri dari dua sub-sistem, yakni sub-sistem pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Selanjutnya, memperhatikan ayat (3) dan (4) fasal yang sama, dapat pula dikatakan bahwa sistem pendidikan luar sekolah terdiri dari dua sub-sistem pula, yakni pendidikan luar sekolah yang dilaksanakan dalam keluarga dan di luar keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan gambar 3.

Gambar 3 . . .

Gambar 3
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL



Keterangan:

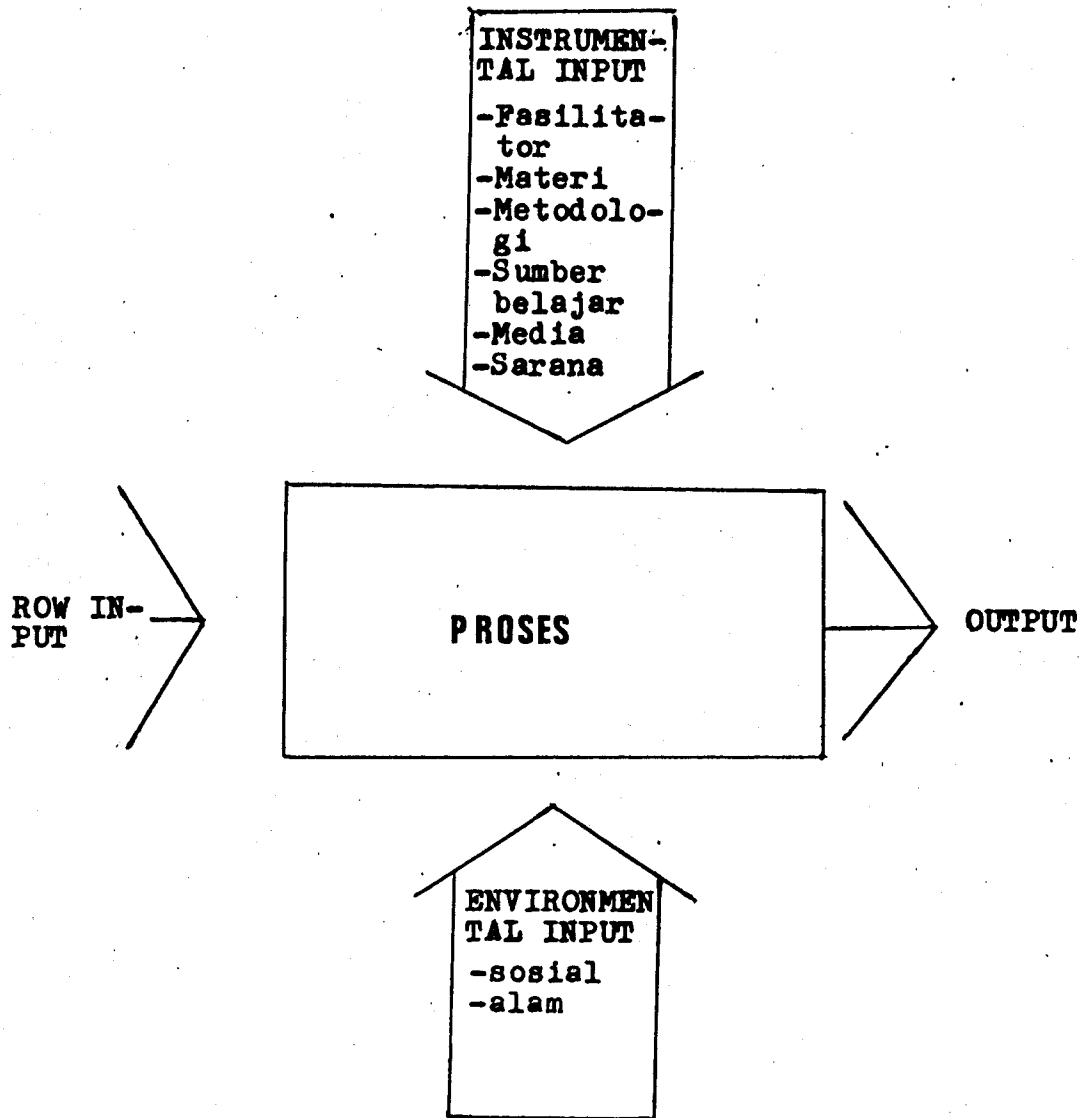
1. Sistem pendidikan sekolah
2. Sistem pendidikan luar sekolah
 - a. Pendidikan luar sekolah dalam keluarga
 - b. Pendidikan luar sekolah di luar keluarga

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa Sisdiknas terdiri dari dua sub-sistem, yakni pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah masing-masing dikatakan sebagai sub-sistem berdasarkan pengertian bahwa, "Sub-sistem merupakan bagian dari keseluruhan sistem yang masing-masing mempunyai fungsi tertentu untuk mencapai tujuan secara keseluruhan" (Soenarwan, 1991: 9). Sebagaimana yang dikemukakan dalam bab IV, masing-masing sub-sistem pendidikan tersebut mempunyai karakteristik dan fungsi yang berbeda, akan tetapi, semuanya (pendidikan sekolah, luar sekolah, dan pendidikan keluarga) mempunyai tujuan yang sama secara nasional, yakni untuk mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Akhirnya Sisdiknas dapat pula dikatakan sebagai sistem terbuka karena dia memerlukan masukan (sasaran didik), proses dalam berbagai lembaga pendidikan, dan hasil sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

3. Sistem Pendidikan Luar Sekolah

Sebagai suatu sub-sistem, maka pendidikan luar sekolah tentu mempunyai komponen sistem sendiri untuk mencapai tujuan sebagai komponen sistem. Adapun komponen sistem pendidikan luar sekolah tersebut dapat digambarkan seperti dalam gambar 4.

Gambar 4
SISTEM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH



MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

Kalau diamati sistem pendidikan luar sekolah yang dikemukakan dalam gambar 5, niscaya akan terlihat kesamaannya dengan sistem pendidikan sekolah. Abdulhal (1986) mengemukakan kesamaan sistem pendidikan luar sekolah dengan pendidikan sekolah adalah dalam hal interaksi edukatif, sedangkan perbedaannya terletak pada kelonggaran sistem pendidikan luar sekolah dan keketatan sistem pendidikan sekolah. Untuk lebih jelasnya perbedaan kedua komponen sistem tersebut, dapat diperhatikan tabel 2.

Tabel 2
PERBANDINGAN KARAKTERISTIK KOMPONEN SISTEM
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN SEKOLAH

Komponen	Pendidikan Luar Sekolah	Pendidikan Sekolah
1	2	3
ROW INPUT	Tidak terbatas oleh usia dan latar belakang pendidikan	Dibatasi oleh usia terutama pada jenjang pendidikan awal dan untuk tingkat pendidikan lanjutan dibatasi oleh latar belakang pendidikan
INSTRUMENTAL INPUT		
-fasilitator/guru	fasilitator tidak dituntut mempunyai latar belakang pendidikan tertentu	guru dipersyaratkan orang yang mempunyai latar belakang pendidikan keguruan (fs 28 ayat (3) UU Sisdiknas
-materi pelajar	disesuaikan dengan kebutuhan warga belajar setempat	ditentukan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan menurut kurikulum pusat
-metoda	berpusat pada masalah, mengutamakan aktivitas dan kerja sama kelompok	berpusat pada materi, pada umumnya telah dibakukan dari pusat

1	:	2	:	3
-sumber belajar	:	disesuaikan dengan sumber belajar lokal yang tersedia	:	pada umumnya terikat pada kurikulum yang bersifat nasional
-media	:	menekankan pada penyesuaian dengan kondisi setempat dan kebutuhan belajar	:	cenderung lebih baku dan dirancang dari pusat
-sarana	:	dapat memanfaatkan berbagai sarana yang tersedia	:	memerlukan sarana khusus
PROSES	:	dapat berlangsung dengan fleksibel	:	berlangsung dengan ketat
ENVIRONEMEN-TAL INPUT				
-sosial	:	lebih banyak mendorong dan saling ketergantungan	:	tidak berpengaruh besar dan langsung
-alam	:	lebih banyak menggunakan sumberdaya alam setempat	:	tidak begitu banyak menggunakan sumberdaya alam setempat
OUTPUT	:	disiapkan untuk tujuan jangka pendek dan cenderung bersifat praktis	:	disiapkan untuk tujuan jangka panjang dan cenderung bersifat akademis

Membandingkan kompones sistem pendidikan luar sekolah dengan komponen sistem pendidikan sekolah, terlihat bahwa karakteristik pendidikan luar sekolah lebih memberi peluang bagi masyarakat desa untuk memperoleh kesempatan pendidikan. Hal tersebut disebabkan hampir semua komponen pendidikan luar sekolah bersifat fleksibel. Oleh karena pendidikan luar sekolah bersifat fleksibel, di samping dia dapat disiapkan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, dia dapat diikuti oleh warga belajar dengan tidak mengorbankan waktunya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bahkan

yang paling efektif ialah kegiatan belajar yang dilaksanakan sambil bekerja. Sehubungan dengan itu, berikut ini akan dianalisis masing-masing komponen sistem pendidikan luar sekolah tersebut.

B. Analisis Sistem Pendidikan Luar Sekolah

1. Row Input

Row input dapat diartikan sebagai masukan mentah, dalam hal ini berarti sasaran didik yang memerlukan pendidikan (diproses) dalam suatu lembaga pendidikan. Dalam lembaga pendidikan luar sekolah biasanya mereka disebut dengan warga belajar. Sedangkan warga belajar dalam pendidikan luar sekolah pada umumnya adalah orang dewasa, sekurang-kurangnya berumur 13 tahun keatas (Soenarwan, 1990).

Sebagaimana dikemukakan dalam komponennya, pendidikan luar sekolah tidak mengenal pembatasan usia, terutama sekali bagi orang dewasa. Sebaliknya dalam pendidikan sekolah, usia merupakan suatu faktor pembatas. Dalam hal inilah terutama pentingnya peranan pendidikan luar sekolah dalam pembangunan masyarakat desa. Persoalannya, tidak banyak orang desa yang dapat menikmati pendidikan sekolah pada usia 13 tahun ke atas atau untuk tingkat SMTP ke atas. Kalaupun ada, kebanyakan dari mereka enggan untuk kembali ke desa, terperangkap dalam jebakan perkotaan (Chambers, 1983).

Soedomo (1989) mengemukakan dua golongan utama warga belajar dalam pendidikan luar sekolah. Pertama para remaja dan pradewasa yang belum bekerja serta belum siap untuk memasuki dunia kerja karena tidak mempunyai seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja. Kedua, adalah mereka yang sudah bekerja, namun kualitas kerjanya belum memadai. Pada masyarakat desa, golongan kedua ini kebanyakan adalah go-

longan petani dan nelayan yang belum mempunyai kemampuan budidaya pertanian dan perikanan yang baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa warga belajar yang perlu di-jaring dalam kegiatan pendidikan luar sekolah selalu berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan. Oleh karena itulah pendidikan untuk mereka selalu harus berorientasi kepada hal yang bermanfaat langsung bagi kehidupannya.

2. Instrumental Input

Instrumental input adalah berbagai faktor atau sarana yang berhubungan langsung dengan keterseleenggaraan suatu kegiatan belajar. Menurut Abdulhak (1986), instrumental input ini mencakup fasilitator, materi, metoda dan pendekatan, sumber belajar, media, dan fasilitas. Berikut ini akan dikemukakan satu persatu masing-masing dari instrumental input tersebut.

a. Fasilitator. Dalam karakteristik komponen sistem pendidikan luar sekolah telah dikemukakan bahwa seorang fasilitator dalam pendidikan luar sekolah tidak dituntut memiliki latar belakang pendidikan tertentu. Hal tersebut bukan berarti setiap orang dapat menjadi fasilitator dengan begitu saja. Kindervatter (1979) mengemukakan bahwa setiap calon fasilitator memerlukan latihan dalam waktu yang relatif singkat sebelum menjadi fasilitator. Selain daripada itu, seorang fasilitator harus mempunyai sikap dan tekad yang positif. Diperlukan sikap dan tekad yang positif berhubungan dengan kegiatan belajar orang dewasa yang merupakan proses kerjasama dalam pemecahan masalah belajar. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar pendidikan luar sekolah diperlukan seseorang atau lebih yang mampu berperan sebagai pembimbing, bukan seseorang yang cenderung menggurui dengan memperlakukan warga belajar sebagai objek dalam pengajaran. Sebab menurut Lunandi (1981) orang dewasa bukanlah seperti gelas kosong

MILIK UPT PERPUST
IKIP PAT

6
AKAAN
JANG

yang dengan mudah dapat diisi dengan sesuatu, orang dewasa tidak dapat diajar dengan begitu saja.

Seorang fasilitator harus menyadari bahwa warga belajar adalah orang dewasa yang unik dan beragam tingkat kebutuhannya, situasi dan kondisinya. Oleh karena itu, seorang fasilitator haruslah kreatif dan berusaha mengembangkan kecakapannya dalam pendekatan, metoda dan teknik belajar orang dewasa. Selanjutnya, sesuai dengan tugas seorang fasilitator untuk merancang kegiatan belajar secara bersama-sama dengan warga belajar, dia perlu pula mengembangkan kemampuannya dalam mengenal karakteristik orang dewasa dalam belajar untuk memudahkannya dalam membantu mengidentifikasi kebutuhan, merancang strategi, menetapkan pendekatan, dan materi belajar mereka.

b. Materi belajar. Merumuskan materi belajar dalam kegiatan belajar pendidikan luar sekolah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, sebab kebutuhan belajar haruslah dirumuskan berdasarkan kebutuhan belajar. Sedangkan kebutuhan belajar orang dewasa sangatlah beragam dan topang tindih antara satu dengan yang lainnya. Namun demikian, untuk pedoman praktis dalam merumuskan kebutuhan belajar dalam rangka pembangunan masyarakat desa, Coombs dan Ahmed (1974), merumuskan kebutuhan belajar tersebut kepada kelompok: (1) Pendidikan umum dan dasar, mencakup pemberantasan buta huruf dan pengetahuan dasar yang berhubungan dengan pengetahuan fungsional yang pada umumnya diusahakan oleh "program pendidikan dasar"; (2) Pendidikan kesejahteraan keluarga, terutama dirancang untuk menyebarkan pengetahuan, keterampilan, dan watak yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, mencakup bahan belajar tentang ilmu kesehatan, gizi, keterampilan kerumah-tanggaan, pengasuhan anak, keluarga berencana dan sejenisnya; (3) Pendidikan kemasyarakatan, yang bertujuan untuk mengokohkan dan menyempurnakan lembaga-lembaga da

proses-proses daerah dan nasional melalui kegiatan belajar tentang pemerintahan daerah dan negara, gerakan koperasi, proyek pembangunan masyarakat dan sebagainya; dan (4) Pendidikan kejuruan, dirancang untuk membina kependaian dan keterampilan tertentu yang berhubungan dengan berbagai kegiatan dalam bidang ekonomi dan keperluan yang berhubungan dengan mata pencarian. Barangkali setiap pengamat pembangunan desa sepakat bahwa apa yang dikemukakan oleh Coombs dan Ahmed tersebut memang perlu dipenuhi dalam rangka pembangunan desa. Persoalannya sekarang adalah kebutuhan mana yang perlu dipenuhi terlebih dahulu atau dalam hal apa dan di mana pendidikan dikonsentrasikan, sebab belum tentu semua kebutuhan tersebut dirasakan oleh warga belajar.

Mengingat pendidikan orang dewasa hanya akan efektif apabila isi dan kebutuhan pendidikan yang diprogramkan sesuai dengan kebutuhan yang mereka rasakan (Lunandi, 1981), kiranya kegiatan pendidikan luar sekolah di pedesaan perlu dimulai dengan kebutuhan keempat, yakni kegiatan pendidikan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi atau mata pencarian. Sebab pendidikan yang berhubungan dengan ekonomi akan mudah dirasakan hasil oleh warga belajar, pendidikan dalam bidang tersebut dapat dijadikan sebagai landasan untuk mencapai ketiga tujuan lainnya. Oleh karena itu, meskipun program pendidikan bernama program pendidikan keterampilan pertanian misalnya, tetapi dia perlu diintegrasikan dengan pendidikan kemasyarakatan, kesejahteraan keluarga, dan pendidikan dasar ke dalamnya.

Kesulitan lain yang ditemukan dalam memilih materi belajar ialah berkenaan dengan biaya dan tenaga (fasilitator atau sumber belajar). Untuk mengatasi kesulitan demikian, Kindervatter (1979) mengajukan beberapa pertimbangan dalam rangka merumuskan materi pelajaran yang layak dan efektif: (1) Materi pelajaran yang disajikan ti-

tidak memerlukan ongkos yang mahal; (2) Dapat dikelola oleh fasilitator yang tidak berkualifikasi; (3) Menghendaki sedikit keterlibatan fasilitator; (4) Dapat memotivasi warga belajar untuk belajar selanjutnya; dan (5) Berisikan elemen-elemen yang pasti.

c. Metoda dan pendekatan. Dalam kegiatan belajar dikenal empat pendekatan, yakni pendekatan informasi, pemecahan masalah, proyektif, dan pendekatan perwujudan diri (Soedomo, 1989). Pendekatan informasi lebih menekankan kepada pengalihan (transfer) pengetahuan dan keterampilan kepada sasaran didik--cenderung diberikan di sekolah. Pendekatan pemecahan masalah, proyektif, dan perwujudan diri kiranya lebih tepat digunakan dalam pendidikan luar sekolah, karena ketiganya lebih mencirikan pemandirian.

Dalam pendekatan yang berpusat kepada masalah seorang fasilitator hanya pemberi rangsangan dan selanjutnya berharap rangsangan yang diberikan tersebut membuat warga belajar berusaha untuk memecahkannya sendiri melalui diskusi. Oleh karena rangsangan diperlukan, tidak tertutup kemungkinan bagi fasilitator untuk memberikan informasi, akan tetapi informasi yang diberikan bukanlah untuk ditransfer dengan begitu saja. Penyajian informasi sebagai rangsangan haruslah mengandung permasalahan yang perlu dikaji arti dan maknanya serta sebab dan akibatnya. Dengan cara yang demikianlah warga belajar dapat memahami masalah yang sedang mereka hadapi dan berusaha untuk memecahkannya.

Pendekatan proyektif pada dasarnya merupakan pendekatan yang berorientasi pada pemecahan masalah juga. Akan tetapi pendekatan ini disajikan melalui cerita yang mengandung berbagai permasalahan yang tidak terselesaikan. Masalah-masalah yang tidak terselesaikan tersebut menyangkut dengan masalah teknis atau sosial ekonomi. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada warga belajar untuk menye-

lesaikannya menurut perasaan, tatanilai, dan sikap mereka sendiri dengan penekanan pada penggunaan daya nalar. Dengan pendekatan tersebut diproyeksikan bahwa warga belajar akan melihat dirinya sendiri dan mengembangkan kemampuannya untuk merubah diri.

Pendekatan perwujudan diri dimulai dengan memberikan bahan-bahan mentah yang dapat digunakan oleh warga belajar untuk menciptakan dan menceritakan kejadian dan keadaan-keadaan yang mengandung masalah. Bahan mentah tersebut antara lain berupa gambar-gambar tunggal yang dapat bergerak (fleksibel). Bahan mentah yang diberikan tidak mengandung informasi lain selain daripada hal yang berhubungan dengan manusia. Warga belajar memanipulasi rangsangan yang diberikan untuk dapat mengungkapkan arti dari gambar-gambar yang diberikan sesuai dengan kemauan masing-masing. Selanjutnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih banyak tentang gambar-gambar tersebut dapat dilakukan melalui diskusi kelompok, konsultasi, wawancara serta melalui perbandingan penafsiran yang berbeda terhadap rangsangan (gambar) yang sama. Penekanan pada pendekatan ini adalah untuk pengembangan kepercayaan diri dan kemampuan berkomunikasi serta pemecahan masalah berdasarkan bahan belajar mereka sendiri.

d. Sumber belajar. Sumber belajar dalam suatu kegiatan belajar mestilah berhubungan dengan kebutuhan dan materi belajar, kebutuhan belajar tidak akan terpenuhi dengan baik apabila sumber belajar tidak tersedia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemampuan untuk merumuskan kebutuhan belajar harus diberengi dengan kemampuan untuk mengidentifikasi sumber belajar. Sumardi (1987) menggolongkan sumber belajar pada empat golongan, yakni lingkungan fisik, lingkungan kebudayaan, lingkungan sosial, dan manusia.

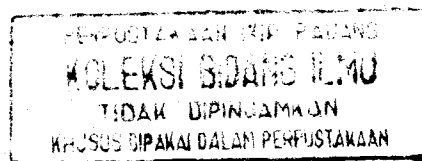
Lingkungan fisik merupakan sumber belajar yang tidak

terbatas. Lingkungan pisik mencakup tanah, tumbuh-bumbuhan, air, gunung, pasir, batu, hewan, dan sebagainya; semuanya itu dapat dijadikan sumber belajar. Akan tetapi semuanya baru merupakan bahan mentah yang perlu diolah menjadi sumber belajar yang efektif. Oleh karena itu diperlukan kejelian fasilitator untuk mengamati dan memanipulasi sumber belajar lingkungan pisik yang tersedia. Sebab tidak semua lingkungan pisik dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang efektif sesuai dengan tujuan, kecuali melalui hasil seleksi dan manipulasi.

Kebudayaan dapat digunakan sebagai sumber belajar baik secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung ialah dengan mempelajari kesenian, tradisi, atau peninggalan-peninggalan kuno dan sebagainya. Secara tidak langsung ialah dengan menjadikannya sebagai perantara atau media, misalnya dengan menggunakan salah satu jenis kesenian untuk menyampaikan berbagai pesan, seperti KB, kesehatan, pertanian dan sebagainya.

Penggunaan lingkungan sosial sebagai sumber belajar juga dapat diartikan secara tidak langsung dan langsung. Secara langsung misalnya dengan mempelajari berbagai lembaga kemasyarakatan yang ada, seperti organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Secara tidak langsung ialah dengan memanfaatkan organisasi sosial dan keagamaan yang ada sebagai tempat belajar, misalnya ikut aktif dalam kegiatan karang taruna.

Manusia sebagai sumber belajar dapat sebagai pengajar dan sumber informasi. Sebagai pengajar, yang bersangkutan adalah sebagai perantara untuk menyampaikan informasi yang mungkin tidak berasal dari dirinya sendiri. Sebagai sumber informasi, berarti yang bersangkutan mempunyai pengetahuan atau keterampilan "lebih" dalam bidangnya. Sumber informasi dapat berperan sebagai konsultan, tempat bertanya, atau memberikan nasehat kalau diperlukan.



e. Media. Pada dasarnya media pendidikan luar sekolah dengan media pendidikan luar sekolah tidak mengandung perbedaan yang nyata. Namun demikian Evan (1976), menekankan perancangan media yang lebih efektif dalam kegiatan pendidikan luar sekolah, perlunya perhatian yang lebih seksama dalam penggunaan sumber-sumber dan cara-cara yang sesuai dengan keadaan setempat, tujuan pendidikan, dan kebutuhan warga belajar. Oleh karena beragamnya kebutuhan belajar dalam kegiatan pendidikan luar sekolah maka diperlukan kemampuan lokal untuk menyiapkan media yang sesuai dengan kebutuhan belajar yang berbeda tersebut. Bahkan Kindervatter dalam penelitiannya tentang pendidikan luar sekolah di Indonesia dan Thailand mengemukakan bahwa warga belajar di Jayagiri (Jawa Barat) dilibatkan dalam pembuatan media belajar.

f. Sarana. Sarana pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah sarana pendidikan dalam arti sempit, yaitu yang merupakan bagian kecil dari instrumental input. Sarana tersebut mencakup tempat belajar atau ruangan, tempat duduk, meja tulis, dan sejenisnya. Sesuai dengan sifat atau karakteristik pendidikan luar sekolah, maka sarana untuk pelaksanaan kegiatan belajar dapat memanfaatkan segala sesuatu yang tersedia di lingkungan, misalnya gedung sekolah dasar yang hanya digunakan pada pagi hari atau balai desa. Kelompok belajar di Jayagiri, Lembang yang dinilai berhasil oleh Kindervatter (1979) melaksanakan kegiatan belajarnya di rumah warga belajar di waktu malam hari di bawah sinar lampu petromax, sedangkan kegiatan belajar dalam rangka pembangunan desa dan pemuda di Thailand dilaksanakan di balai desa dan bahkan di lapangan terbuka.

3. Environmental Input

Environmental input adalah masukan yang tidak diran-

cang dengan sedemikian rupa dalam kegiatan belajar, akan tetapi dia berada dan berpengaruh di sekitar kegiatan belajar, oleh karena itu dia disebut juga sebagai masukan lingkungan (environmental input). Masukan lingkungan ini dapat digolongkan kepada masukan lingkungan fisik dan masukan lingkungan sosial.

Oleh karena kedua masukan tersebut berpengaruh bagi kelancaran, baik dalam arti menunjang maupun dalam arti menghambat, maka kedua masukan tersebut perlu mendapatkan perhatian fasilitator atau pamong belajar. Lingkungan fisik yang bising misalnya, akan mengganggu konsentrasi warga belajar dalam mengikuti kegiatan belajar. Selain daripada itu, lingkungan fisik juga berhubungan dengan kondisi fisik warga belajar, misalnya warga belajar yang daya penglihatannya sudah menurun dalam ruang belajar yang tidak begitu terang akan mengalami kesulitan untuk melihat. Lingkungan fisik juga berhubungan dengan penyeleksian dan pengolahan alam sebagai sumber belajar sebagaimana yang dikemukakan pada bagian terdahulu.

Mengolah lingkungan fisik untuk memperlancar proses belajar relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan mengelola lingkungan sosial. Sebab tidak jarang pengaruh lingkungan sosial dapat lebih besar daripada pengaruh kegiatan belajar. Hal ini dikarenakan kegiatan belajar berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, sedangkan dalam lingkungan sosial, interaksi berlangsung hampir sepanjang waktu kehidupan warga belajar. Oleh karena itu, lingkungan sosial ini perlu mendapat perhatian tinggi dari para pengelola kegiatan belajar pendidikan luar sekolah, terutama pengaruh yang bersifat negatif terhadap keberlangsungan kegiatan belajar.

4. Proses Belajar

Dalam mendiskusikan proses belajar sebagai salah sa-

tu komponen pendidikan, akan sulit untuk menghindarkan diri dari mendiskusikan komponen lainnya. Hal tersebut kiranya wajar, karena yang dikatakan sebagai proses belajar ialah interaksi edukatif antara row input dengan instrumental input dan pengaruh environmental input (Abdulhak, 1986). Berdasarkan interaksi tersebutlah terjadi perubahan tingkah laku dengan jalan mentransformasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang sesuai dengan tujuan belajar yang diharapkan.

Meskipun pada dasarnya hasil belajar yang diharapkan baik dari anak maupun dari orang dewasa tidaklah berbeda, yakni perubahan tingkah laku, akan tetapi pendekatan yang digunakan dalam keduanya mestilah berbeda. Menurut Abdulhak (1986), ada dua hal pokok yang menyebabkan perbedaan pendekatan proses belajar antara orang dewasa dengan anak-anak. Pertama, berhubungan dengan struktur kognitif yang dimiliki oleh orang dewasa yakni pengetahuan yang meliputi fakta, konsep, proposisi, teori, dan kemampuan lain yang telah dimilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa orang dewasa lebih matang dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap jika dibandingkan dengan anak-anak. Sejalan dengan itu, Lunandi (1981), mengemukakan bahwa sebagai warga orang dewasa telah mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap tertentu. Bahkan tidak jarang sikap itu sudah sangat menetap dalam dirinya, sehingga tidak mudah untuk merubahnya. Pengetahuan yang selama ini dianggapnya benar dan bermanfaat belum tentu dengan mudah untuk digantikan dengan pengetahuan baru jika kebetulan tidak sejalan dengan yang lama. Tegasnya, orang dewasa telah mempunyai nilai-nilai tersendiri dan mampu menilai apa yang ditawarkan kepadanya.

Kedua, perbedaan bahan belajar yang juga berhubungan dengan struktur kognitif. Orang dewasa dalam belajar mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk memecahkan masa-

lah, sebaliknya anak-anak lebih menonjol dalam kemampuan menghafal. Oleh karena itu, jika kepada anak-anak diberikan materi pelajaran tertentu, mereka tidak akan banyak mempertanyakannya, mereka lebih cenderung untuk menguasai saja pelajaran tersebut. Sebaliknya dengan orang dewasa, jika diberikan materi pelajaran tertentu, mereka akan mempertanyakan (memikirkan) apa manfaat materi pelajaran itu bagi dirinya. Lunandi (1981) mengemukakan bahwa pendidikan bagi orang dewasa hanya akan menjadi efektif dalam arti menghasilkan perubahan tingkah laku, apabila isi dan cara pendidikan yang diberikan kepadanya sesuai dengan kebutuhan yang mereka rasakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan proses belajar orang dewasa tidak dapat disamakan dengan pengelolaan proses belajar anak-anak. Pengelolaan proses belajar orang dewasa haruslah berdasarkan pendekatan andragogi, sedangkan pengelolaan proses belajar anak-anak berdasarkan pendekatan paedagogi. Mengenai pendekatan andragogi akan didiskusikan dalam bagian selanjutnya dalam pengembangan program belajar pendidikan luar sekolah.

5. Output

Mendiskusikan output (keluaran atau hasil) dari suatu kegiatan pendidikan mestilah berurusan dengan tujuan yang telah dirumuskan. Hal ini sesuai dengan pengertian sistem yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa setiap komponen sistem berorientasi pada tujuan, yang dalam sistem terbuka disebut dengan output atau hasil. Oleh karena itu, untuk mengetahui keberhasilan suatu sistem pendidikan, maka dia haruslah diukur dengan keberhasilannya dalam mencapai tujuan.

Berkenaan dengan pencapaian tujuan sebagai hasil dari suatu kegiatan pendidikan, Abdulhak (1986) menyebutnya

sebagai hasil langsung dan hasil akhir. Pertama, hasil langsung adalah merupakan pencapaian tujuan spesifik yang menggambarkan perubahan tingkah laku yang dapat diukur setelah warga belajar mengikuti kegiatan belajar. Perubahan tingkah laku yang dimaksudkan ialah dalam bentuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta perubahan sikap. Semua perubahan tersebut dalam taraf tertentu harus dapat dilihat dan diobservasi secara langsung, untuk kemudian dapat dibandingkan dengan tujuan spesifik yang telah dirumuskan. Akhirnya pencapaian tujuan spesifik tersebut akan mencerminkan pencapaian tujuan kurikuler dan institusional.

Kedua, hasil akhir yang berhubungan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional. Sebagaimana yang dikemukakan dalam diskusi tentang sistem pendidikan nasional, maka setiap sus-sistem dari sistem pendidikan nasional, baik sekolah, luar sekolah, maupun keluarga, haruslah berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan nasional, yakni bertujuan,

. . . mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (UU RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas, fasal 4).

Tujuan pendidikan nasional tersebutlah yang merupakan hakekat dan tujuan akhir dalam segala bentuk kegiatan pendidikan. Tercapai atau tidaknya tujuan akhir tersebut haruslah mengacu kepada tujuan pendidikan nasional. Meskipun tujuan akhir tersebut bersifat umum dan ideal, akan tetapi setiap usaha dalam merumuskan tujuan-tujuan spesifik, kurikuler dan institusional haruslah dalam kerangka pencapaian tujuan pendidikan nasional sebagai tujuan akhir dalam setiap kegiatan pendidikan. Oleh karena itu,

penyelenggaraan pendidikan luar sekolah dalam bentuk apapun harus dipulangkan dan menyumbang pada pencapaian tujuan pendidikan nasional yang akhirnya diharapkan pula dapat menyumbang secara penuh terhadap pembangunan nasional secara merata sampai ke pelosok-pelosok desa.

C. Pengembangan Program Belajar Pendidikan Luar Sekolah

1. Pendekatan Andragogi

Sudah sering dikemukakan bahwa pendekatan pendidikan sekolah--terutama sekolah tradisional--berpusat pada guru, sedangkan pendekatan pendidikan luar sekolah yang warga belajarnya adalah orang dewasa menggunakan pendekatan yang berpusat kepada warga belajar. Kedua pendekatan tersebut masing-masing dikatakan sebagai pendekatan paedagogi dan pendekatan andragogi. Lalu, apa dan bagaimanakah perbedaan antara kedua pendekatan tersebut ?

Paedagogi adalah seni dan ilmu mendidik anak dalam mentransmisikan sejumlah pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan dalam rangka menyiapkan anak untuk menghadapi hidup dan kehidupannya di masa mendatang. Sedangkan andragogi adalah ilmu dan seni membantu orang dewasa belajar dalam suatu proses penemuan pengetahuan, keterampilan dan sikap sepanjang hayat terhadap segala sesuatu yang dibutuhkan dan diperlukan untuk diketahui. Proses penemuan ini bukan hanya sekedar transmisi pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pertimbangan pendidik atau fasilitator, akan tetapi didasarkan kepada kepentingan peserta didik atau warga belajar sendiri. Warga belajar sendiri lah yang menentukan penting atau tidak pentingnya pengetahuan dan keterampilan yang hendak dipelajari (Ahmudipura dan Atmaja, 1986).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik perbedaan antara pendekatan paedagogi dengan pendekatan andra-

gi. Dalam pendekatan paedagogi, guru dianggap sebagai sumber belajar yang mengetahui segala pengetahuan dan persoalan. Anak-anak menerima secara keseluruhan pengetahuan dan keterampilan yang diberikan, walaupun pengetahuan dan keterampilan yang diberikan tersebut tidak diketahui kegunaannya oleh anak. Gurulah yang menentukan pengetahuan apa yang harus diberikan kepada anak-anak yang telah digariskan dalam suatu kurikulum yang harus dipegang oleh semua sekolah dalam rangka pelaksanaan program pendidikannya.

Sedangkan pendekatan pendidikan yang bersifat andragogis, seorang pengajar (fasilitator atau sumber belajar) bukanlah penguasa tunggal dalam menentukan kegiatan belajar. Dia hanyalah dianggap sebagai seseorang yang memiliki dan mengetahui tentang suatu hal, yakni berupa pengalaman dan keterampilan. Proses pendidikan berlangsung berdasarkan keperluan seseorang untuk mempelajarinya karena dia merasakan adanya kebutuhan untuk mempelajarinya. Fasilitator hanya berfungsi sebagai pembimbing dan pengarah agar sekelompok orang atau individu dapat belajar dalam rangka memenuhi kebutuhan belajarnya. Sehingga dengan demikian proses belajar berlangsung karena adanya dorongan dari dalam diri orang dewasa itu sendiri karena adanya kebutuhan.

Memperhatikan pendekatan andragogi dalam kegiatan pembelajaran, terlihat bahwa pendekatan tersebut lebih mengutamakan proses pemandirian. Sedangkan permasalahan utama dalam pembangunan masyarakat desa sebagaimana yang dikemukakan pada bagian terdahulu adalah masalah kurangnya kemandirian masyarakat desa. Oleh karena itulah, maka pengembangan pendidikan luar sekolah di pedesaan bukan hanya sekedar penerapan sistem pesekolah di lembaga pendidikan luar sekolah, akan tetapi hendaknya benar-benar pendekatan pendidikan luar sekolah yang sesuai dengan prin-

sip dan prosedur pengembangan program belajar pendidikan orang dewasa bagi kemandirian, yakni dengan menggunakan pendekatan yang bersifat andragogis. Sehubungan dengan itu, berikut ini akan dikemukakan prosedur pengembangan program pendidikan luar sekolah yang berdasarkan pendekatan andragogis.

2. Prosedur Pengembangan Program Belajar Pendidikan Luar Sekolah

Soedomo (1989) membedakan pendekatan pengembangan program belajar pada dua model, yakni model isi dan proses. Model isi menekankan pada pengalihan informasi dan keterampilan. Sedangkan model proses menekankan pada penyediaan prosedur dan sumber-sumber untuk membantu warga belajar menguasai atau memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkannya. Berdasarkan pengertian pendekatan paedagogi dan andragogi tersebut dapat disimpulkan bahwa pendekatan paedagogi berorientasi pada isi dalam pengembangan program belajar, sedangkan pendekatan andragogi berorientasi pada proses. Oleh karena pada umumnya warga belajar pendidikan luar sekolah adalah orang dewasa maka pengembangan program belajar pendidikan luar sekolah seharusnya menggunakan pendekatan proses, karena dengan pendekatan proseslah dimungkinkannya tercipta kondisi belajar sepanjang hidup. Sebab model tersebut menekankan pada cara belajar secara langsung dari pengalaman, merupakan proses pendidikan ulang dan swa-arrah yang memberikan peluang kepada warga belajar untuk terus menerus mengenali kebutuhan belajar yang berkembang mengikuti perkembangan zaman. Sehubungan dengan itu, Soedomo menyarankan penggunaan prosedur yang dianjurkan oleh Knowles, sebagai berikut:

a. Memapankan suasana yang mendukung belajar. Dalam memapankan suasana yang mendukung kegiatan belajar, ada

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

tiga hal yang perlu dikelola, yakni lingkungan fisik, hubungan antar manusia, dan struktur kelompok.

1) Pengelolaan lingkungan fisik, berhubungan dengan penyediaan sarana dan kemudahan dalam kegiatan belajar. Sarana yang perlu disediakan dapat berupa manusia maupun yang berhubungan dengan bahan-bahan, seperti buku-buku, panflet, petunjuk-petunjuk, buletin, rekaman, dan alat bantu lainnya. Sehubungan dengan penyediaan sumber belajar ini, Evan (1976) dan Kindervatter (1979) menyarankan untuk mengikutsertakan warga belajar, misalnya dengan meminta warga belajar untuk mengumpulkan bahan-bahan bacaan yang berhubungan dengan kebutuhan belajar mereka ataupun dengan meminta mereka untuk merekam siaran pedesaan untuk didiskusikan dalam kelompok belajar. Menurut pengamatan Kindervatter pelibatan warga belajar dalam mengelola sumber belajar dapat meningkatkan aktivitas belajar warga belajar. Hal tersebut diamatinya sendiri dalam kegiatan kelompok belajar di Jayagiri. Setelah terbiasa dilibatkan dalam pengelolaan sumber belajar, warga belajar dapat mencari dan memanipulasi sendiri lingkungannya sebagai sumber belajar. Misalnya, karena banyak bambu yang tersedia di lingkungan, mereka meminta pelajaran tambahan mengukir bambu untuk dipasarkan di objek wisata. Bahkan pernah menurut Kindervatter bahwa kegiatan belajar tentang kesehatan direncanakan akan diisi oleh dokter Puskesmas, ternyata dokter tersebut tidak datang, mereka menghubungi seorang bidan untuk menggantikan, kebetulan bidan tersebut adalah warga desa setempat.

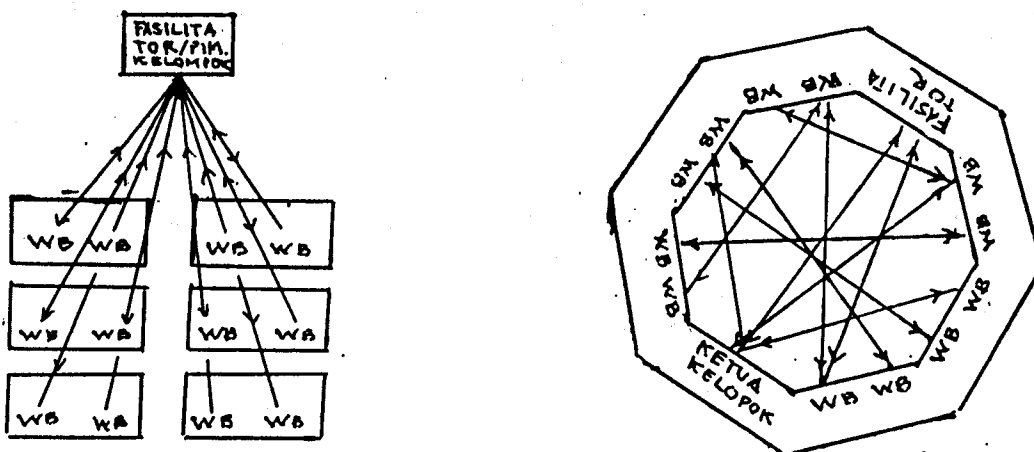
Pengelolaan lingkungan fisik untuk memudahkan dan menyenangkan kegiatan belajar di antaranya berhubungan dengan penataan ruangan atau tempat belajar. Ruangan perlu ditata dengan sedemikian rupa, sehingga memungkinkan udara dan cahaya masuk secukupnya untuk kesegaran belajar. Selain dari pada itu, yang tidak kalah pentingnya adalah

penataan tempat duduk. Penataan tempat duduk akan mempengaruhi aktivitas warga belajar dalam mengikuti kegiatan belajar. Tempat duduk yang disusun berbanjar biasanya mengakibatkan sebagian warga belajar tidak aktif dan interaksi cenderung terjadi hanya antara warga belajar tertentu dengan fasilitator atau pimpinan kelompok. Sebab biasanya dalam susunan tempat duduk berbanjar warga belajar yang aktif dan mempunyai kepercayaan diri tinggi duduk di bagian paling depan, sedangkan warga belajar yang kurang aktif dan kurang mempunyai kepercayaan diri cenderung duduk di belakang. Oleh karena itu, biasanya warga belajar yang duduk di depan lebih aktif daripada yang duduk di belakang. Di samping itu, arus komunikasi hanya berlangsung dua arah, yakni antara warga belajar dengan fasilitator atau pimpinan kelompok.

Sebaliknya penataan tempat duduk dengan sistem lingkaran akan menghilangkan kesan perbedaan antara warga belajar dan bahkan antara warga belajar dengan fasilitator dan pimpinan kelompok. Oleh karena itu, penataan tempat duduk yang demikian merangsang partisipasi yang sama antara sesama warga belajar dan dengan fasilitator atau pemimpin kelompok. Hal tersebut di antaranya karena tempat duduk tidak mencerminkan perbedaan status dan memberikan peluang yang lebih besar untuk terjadinya komunikasi silang. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan gambar 5.

Gambar 5 . . .

Gambar 5
PENATAAN TEMPAT DUDUK YANG MEMPENGARUHI
AKTIVITAS KEGIATAN BELAJAR



2) Memapankan hubungan antar manusia. Memapankan hubungan antar manusia dapat dilakukan dengan berbagai penekanan psikologi. Untuk itu, Soedomo (1989), mengemukakan beberapa pandangan psikologi dalam rangka memapankan hubungan antar manusia dalam kegiatan belajar orang dewasa, di antaranya pendekatan psikologi kognitif, kepribadian, humanistik, dan psikologi medan. Menurut psikologi kognitif suasana belajar yang menyenangkan akan tercipta dalam kegiatan belajar orang dewasa apabila tujuan belajar terjabarkan dengan jelas, adanya harapan dan peluang untuk mencapai tujuan, terbukanya kesempatan untuk bertanya, dan diperolehnya jawaban yang objektif dan jujur. Dengan kondisi yang demikian, terbukalah peluang untuk belajar dengan penemuan (discovery), serta memungkinkan peluang untuk bereksperimen tanpa takut mengalami kesalahan.

Sedangkan psikologi kepribadian menekankan pada suasana yang menghargai perbedaan individu dan budaya. Hal

tersebut berarti memberi peluang kepada masing-masing warga belajar untuk berbeda dengan yang lainnya dengan pengertian bahwa setiap anggota kelompok tidak perlu ragu-ragu untuk mengemukakan permasalahan, kebutuhan, dan bahkan perbedaan pendapatnya tanpa takut dicela oleh anggota kelompok yang lain dan bahkan oleh fasilitator. Hal-hal yang demikian perlu mendapatkan perhatian dari fasilitator agar perbedaan pendapat tidak menimbulkan konflik, sebaliknya menjadikan kelompok lebih aktif. Sebab dari satu aspek perbedaan pendapat memang dapat menimbulkan konflik, tapi dari aspek lain dia mempunyai arti yang besar untuk menumbuhkan kemandirian, aktivitas, dan kreativitas.

Selanjutnya pendekatan psikologi humanis mengusulkan pemaparan hubungan antar manusia dengan mengembangkan suasana aman, tentram, saling menerima, saling percaya, saling menghargai, dan saling mengerti, baik antara sesama warga belajar maupun antara warga belajar dengan fasilitator. Untuk dapat menciptakan suasananya yang demikian, maka seluruh kegiatan belajar harus didasarkan pada pemahaman bahwa kegiatan belajar tersebut adalah untuk kepentingan masing-masing warga belajar, sehingga semua warga belajar menerima segala kegiatan belajar tanpa adanya rasa keterpaksaan.

Akhirnya, para pakar psikologi medan menekankan pada pentingnya kerjasama daripada persaingan, pengembangan kesetiakawanan kelompok, dan hubungan antar pribadi yang didukung oleh norma peranserta aktif. Hal ini mengandung arti meskipun suatu permasalahan hanya dilemparkan salah seorang anggota kelompok, anggota kelompok yang lain perlu dirangsang untuk mempunyai kepedulian terhadap masalah yang dilemparkan tersebut. Dengan cara yang demikian, warga belajar yang mempunyai masalah dapat dibantu, sedangkan yang membantu memperoleh pengalaman belajar yang mungkin dapat digunakannya untuk menghadapi masalah yang

sama pada suatu waktu nanti.

3) Pemapanan struktur organisasi kelompok. Membentuk kelompok belajar sering lebih mudah daripada keberlangsungan kegiatan belajarnya. Dalam banyak kasus terlihat, betapa banyak kelompok-kelompok belajar yang didirikan, baik karena ada proyek dari lembaga-lembaga tertentu, maupun yang dibentuk oleh sukarelawan "orang luar" lainnya. Kegiatan belajar hanya bertahan sepanjang kegiatan kegiatan tersebut masih ditangani oleh "orang luar". Begitu "orang luar" pergi, kegiatan belajar tersebut pun bubar. Keadaan yang demikian sebagian disebabkan oleh belum mapannya struktur organisasi kelompok.

Membaca apa yang dikemukakan oleh Kindervatter (1979) dan Solli dkk. (1986) dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pembentukan dan pembinaan kelompok menuju kemapanan struktur kelompok. Jumlah anggota kelompok hendaknya relatif kecil, antara 5 - 10 orang. Jumlah yang kecil ini diperlukan untuk lebih memudahkan terciptanya kerjasama dalam kelompok. Kedua, kelompok hendaklah dibentuk berdasarkan pertimbangan kebutuhan belajar yang relatif sama, hingga memudahkan pemenuhan kebutuhan belajar dalam waktu yang sama pula. Ketiga, berhubungan dengan faktor kepemimpinan dalam kelompok yang barangkali merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam memapankan struktur kelompok. Dalam mendiskusikan proses pamandirian dalam kelompok telah dikemukakan bahwa pada tahap awal "orang luar" dapat dan boleh saja memimpin suatu kelompok, akan tetapi secara bertahap dia harus mengalihkan kepemimpinan kelompok kepada anggota kelompok sendiri, yakni anggota yang diperkirakan akan dapat menyatu dalam kelompok. Sebab tidak jarang terlihat bahwa "orang luar" mengalihkan kepemimpinan kelompok pada anggota kelompok yang paling terkemuka, kemudian ternyata bahwa yang bersangkutan masuk kelompok hanya karena motif-

motif tertentu yang bukan karena kebutuhan belajarnya. Akibatnya, begitu "orang luar" pergi--karena kurang merasa memiliki dan membutuhkan--sang pemimpin mengabaikan kelompoknya. Keempat, berhubungan dengan rekrutment anggota kelompok. Dalam merekrut anggota kelompok hendaknya jangan disertai dengan janji-janji yang kiranya sulit untuk dipenuhi, apalagi dengan tekanan. Bila harapan mereka tidak terpenuhi dengan segera mereka akan keluar dari kelompok, begitu juga halnya bila tekanan telah berakhir.

b. Mekanisme perencanaan bersama. Dasar pemikiran bahwa perlunya mekanisme perencanaan bersama ini seperti yang dikemukakan dalam bagian terdahulu (proses pemandirian baik dalam kelompok ataupun dalam lembaga kerja), bahwa orang cenderung untuk bertanggung jawab bila keputusan yang diambil dirasakannya sebagai keputusannya sendiri karena dilibatkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Sebaliknya orang cenderung untuk tidak bertanggung jawab bila dia merasa bahwa dia tidak ikut mengambil keputusan tersebut, apalagi bila dia merasa terpaksa untuk menerima suatu keputusan. Begitu juga halnya dengan perencanaan kegiatan belajar, rencana kegiatan belajar hendaknya dirasakan oleh warga belajar sebagai rencana mereka sendiri, sehingga mereka merasa bertanggung jawab atas terlaksananya rencana tersebut. Dalam hal ini Ahmudipura dan Atmaja (1986) mengemukakan bahwa peranan fasilitator lebih banyak merupakan pembimbing atau narasumber, tanggung jawab akan lebih banyak dipikul oleh seluruh warga belajar yang terlihat dalam kegiatan belajar.

c. Mendiagnosis kebutuhan belajar. Yang dimaksud dengan kebutuhan belajar ialah segala sesuatu--baik berupa pengetahuan, keterampilan, atau sikap--yang perlu dikuasai atau diperoleh seseorang melalui kegiatan bela-

jar. Untuk mendiagnosis kebutuhannya tersebut, Nandler (1982) mengemukakan "metoda pengurangan", yakni dengan mengetahui terlebih dahulu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dimiliki oleh warga belajar (keadaan nyata), kemudian merumuskan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang seharusnya dimiliki oleh warga belajar (keadaan yang diinginkan). Selanjutnya keadaan yang diinginkan dikurangi dengan keadaan nyata, hasil pengurangan tersebutlah yang disebut dengan kebutuhan belajar yang harus dipenuhi. Untuk lebih jelasnya, dapat diperhatikan tabel 3.

Tabel 3
CONTOH CARA MENETAPKAN KEBUTUHAN BELAJAR

Keadaan	: Pengetahuan	: Keterampilan	: Sikap
Yang diharapkan	: 8	: 10	: 7
Nyata	: 8	: 2	: 4
Selisih	: 0	: 8	: 3

Memberikan gambaran dalam bentuk tabel tersebut dimaksudkan untuk mempertegas pengertian tentang kebutuhan dimaksud dengan kebutuhan belajar, bukan dimaksudkan bahwa kebutuhan belajar selalu dapat diukur secara matematis demikian. Lebih lanjut dapat diberi keterangan bahwa kegiatan belajar akan efisien dan efektif bila pendiagnosaan kebutuhan belajarnya lebih jeli. Berdasarkan tabel 2, misalnya berdasarkan identifikasi awal (kasar), diketahui bahwa warga belajar membutuhkan materi pelajaran yang berhubungan dengan penggunaan pupuk. Setelah didiagnosa melalui metoda pengurangan ternyata mereka mempunyai pengetahuan yang cukup (selisih 0) yang paling mereka butuhkan ialah peningkatan keterampilan (selisih 8), sedangkan perubahan sikap porsinya lebih kecil jika dibandingkan dengan porsi keterampilan. Oleh karena itu dapat di-

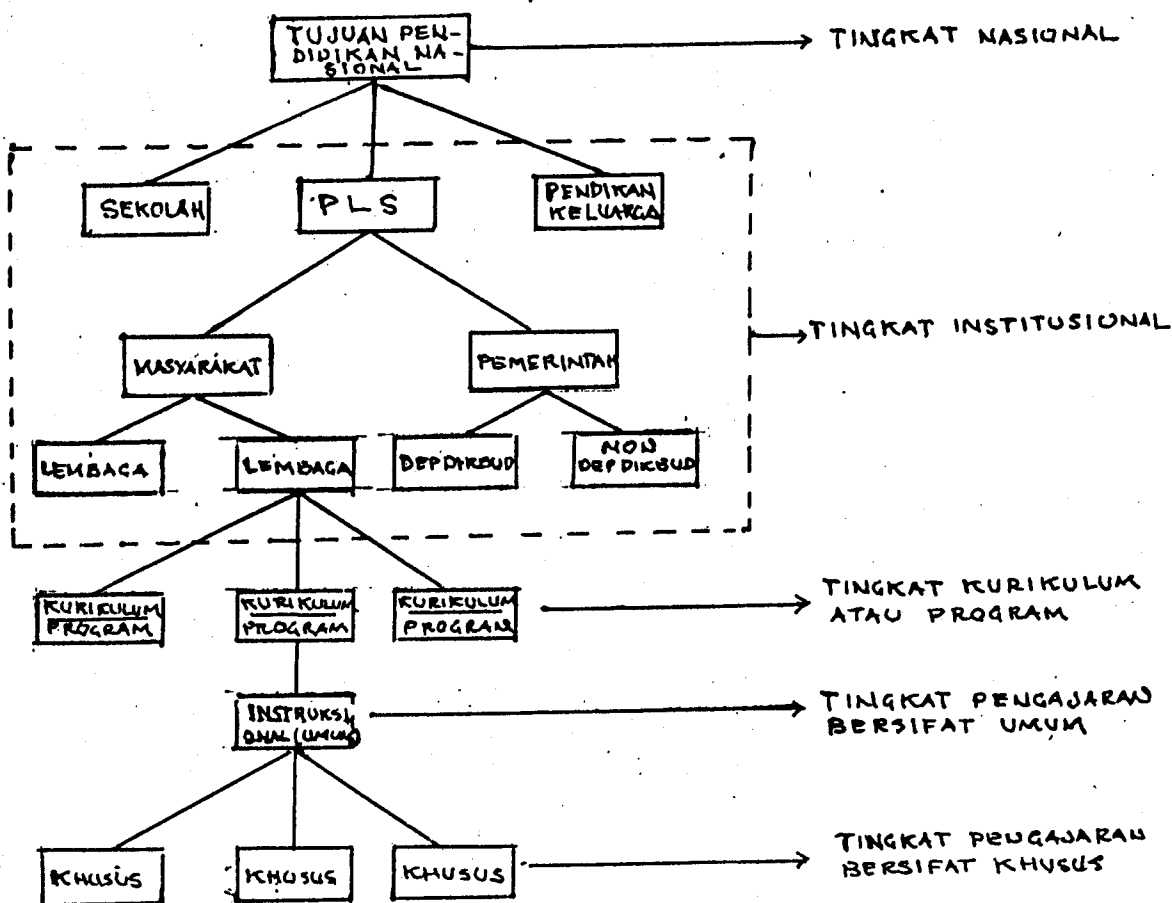
simpulkan bahwa dalam hal penggunaan pupuk warga belajar tidak memerlukan pengetahuan tentang pupuk, kebutuhan belajar mereka yang perlu dipenuhi adalah dalam hal keterampilan menggunakan pupuk serta sikapnya terhadap penggunaan pupuk dalam peningkatan produksi tani; memberikan pengetahuan tentang berbagai jenis pupuk dan sekedar cara penggunaannya berarti pemborosan.

Cara mendiagnosa kebutuhan belajar yang dikemukakan oleh Nadler tersebut sering digunakan untuk mengetahui kebutuhan belajar dalam lembaga-lembaga formal seperti perusahaan, pabrik atau instansi pemerintah, oleh karena itu kegiatan belajarnya--berupa pendidikan dan latihan--lebih cenderung bersifat formal, mereka mengikuti kegiatan belajar lebih banyak karena tuntutan lembaganya. Oleh karena itu, untuk mengetahui kebutuhan belajar dapat melalui catatan produksi masing-masing, observasi, wawancara, dan bahkan melalui angket. Dalam pendidikan luar sekolah yang warga belajarnya mengikuti kegiatan belajar bukanlah karena terpaksa oleh lembaga tertentu, cara yang demikian, tidak dapat ditempuh dengan begitu saja. Meskipun tetap berpedoman pada "metoda pengurangan", hendaknya "metoda pengurangan" tersebut digunakan sendiri oleh warga belajar. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ahmuddipura dan Atmaja (1986) bahwa untuk melibatkan, mengikutsertakan, serta mempertinggi motivasi warga belajar, maka setiap warga belajar harus dilibatkan dalam mendiagnosis kebutuhan belajarnya.

d. Merumuskan tujuan program belajar. Pada dasarnya ada dua pertimbangan pokok dalam merumuskan tujuan program belajar. Dasar pertama adalah hasil identifikasi dan diagnosis kebutuhan belajar sasaran didik. Dasar kedua, sesuai dengan prinsip sistem, bahwa pendidikan luar sekolah adalah sub-sistem dari sistem pendidikan nasional, oleh karena itu, apapun bentuk program pendidikan luar se-

kolah yang dilaksanakan haruslah berorientasi pada pencapaian tujuan pendidikan nasional. Sejalan dengan itu, Abdulhak (1986) mendasarkan perumusan tujuan pendidikan luar sekolah pada tujuan langsung apa yang hendak dicapai, sedangkan tujuan langsung tersebut harus berorientasi pada tujuan akhir yang disebutnya dengan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya dapat pula digambarkan hirarki dari suatu tujuan pendidikan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional, seperti digambarkan dalam gambar 6.

Gambar 6
HIRARKI TUJUAN PENDIDIKAN



Karena berbagai keterbatasan yang tidak mungkin disampaikan di sini, maka penyajian gambar (bagan) 7 dimaksudkan hanyalah untuk mempermudah pemahaman dalam merumuskan suatu tujuan program pendidikan yang kiranya sangat diperolukan oleh seorang fasilitator/pamong belajar dalam membantu atau secara bersama-sama merumuskan tujuan program belajar dengan warga belajar.

Selanjutnya, kembali kepada perumusan tujuan program belajar. Soedomo (1989) merumuskan tujuan program belajar pendidikan luar sekolah pada tiga hirarki, yakni tujuan umum, tujuan program, dan tujuan pembelajaran (instruksional). Untuk keperluan praktis dalam perumusan tujuan tersebut, Soedomo menganjurkan penggunaan tahapan yang dikemukakan oleh Knowles. Tahapan pertama, perumusan tujuan apa yang seharusnya dicapai dalam suatu program pembelajaran; Tahapan kedua, ialah menyaring kebutuhan apa saja yang akan dimasukkan ke dalam program pembelajaran, berdasarkan skala prioritas. Hal ini diperlukan karena tidak mungkin untuk memasukkan semua kebutuhan belajar ke dalam program pembelajaran (Nadler, 1982). Berdasarkan saringan tersebutlah dirumuskan tujuan program pembelajaran secara umum yang menggambarkan apa yang harus dicapai setelah program tersebut terlaksana dengan baik (Sumardi, 1987); Tahapan ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran (instruksional) yang menggambarkan secara umum tujuan apa yang harus dicapai setelah kegiatan pembelajaran berakhir dengan baik. Berdasarkan tujuan umum tersebut dirumuskanlah tujuan khusus (performance) yakni perubahan apa yang harus dicapai setelah kegiatan belajar berakhir. Perumusan tujuan khusus haruslah spesifik dan operasional, artinya setiap perubahan yang terjadi harus dapat diamati dan diukur (Nadler, 1982).

e. Rancangan pola pengalaman belajar. Nadler (1982) mengemukakan bahwa dalam merancang kegiatan belajar pen-

didikan luar mestilah didasarkan pada potensi belajar yang dimiliki oleh warga belajar. Berdasarkan potensi belajar tersebutlah disusun urutan kegiatan belajar, jika potensi belajar yang dimiliki oleh warga belajar rendah, maka perancangan kegiatan belajar haruslah dimulai dari yang konkrit kepada yang abstrak atau sebaliknya. Kelihatannya pendekatan Nadler didasarkan kepada teori kognitif dan inkuiri mendasarkan pola perancangan pengalaman belajar kepada pengaturan urutan pengalaman organis manusia dan memberikan pengalaman belajar untuk pemecahan masalah warga belajar.

Sedangkan Soedomo (1989) dalam perancangan kegiatan belajar pendidikan luar sekolah cenderung menggunakan pendekatan aliran psikologi humanistik yang menekankan pada penataan lingkungan yang memungkinkan tercapainya kemandirian belajar yang partisipatif. Oleh karena itu Soedomo menyarankan perancangan kegiatan belajar yang memungkinkan terciptanya kondisi "belajar untuk belajar".

Kiranya untuk perancangan kegiatan belajar bagi pemandirian masyarakat desa lebih tepat digunakan pendekatan yang disarankan oleh Soedomo. Sebab dengan pendekatan yang demikian, kegiatan belajar tidak menjadi kaku, dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan kebutuhan. Dengan demikian, pendekatan tersebut memberikan peluang kepada warga belajar untuk belajar terus menerus. Kekhawatiran dalam perancangan kegiatan belajar yang berdasarkan pendekatan humanistik ini ialah kegiatan belajar menjadi tidak terstruktur. Akan tetapi Kindervatter (1979) menyarankan untuk tidak usah kuatir dengan tidak terstruktur, asal sebelumnya tujuan umum dari kegiatan belajar telah dirumuskan. Jika tujuan umum kegiatan belajar telah dirumuskan, maka rancangan kegiatan belajar dapat dikembangkan sambil jalan (lihat kembali dimensi-dimensi program pendidikan luar sekolah dalam rangka pemandirian).

MILIK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

f. Pelaksanaan kegiatan belajar. Pada kenyataannya dalam masyarakat telah dilaksanakan berbagai bentuk kegiatan belajar pendidikan luar sekolah, baik dalam bentuk penyuluhan, latihan, maupun dalam bentuk berbagai keterampilan. Dalam pendidikan keterampilan khususnya, setiap orang yang memiliki jenis keterampilan tertentu dapat melaksanakan kegiatan belajar pendidikan luar sekolah sesuai dengan jenis keterampilan yang dimilikinya. Mengingat warga belajar pendidikan luar sekolah adalah orang dewasa, Soenarwan (1990) mempertanyakan kebasahan pelaksanaan kegiatan belajar yang demikian jika ditinjau dari teori belajar orang dewasa.

Selanjutnya, Soedomo (1989) mensinyalir bahwa kebanyakan pelaksanaan kegiatan belajar pendidikan luar sekolah ditangani dengan pendekatan paedagogi seperti yang berlangsung dalam pelaksanaan kegiatan belajar di sekolah, terutama sekali yang menyangkut dengan sumber belajar, Sumber belajar yang tersedia menurut Soedomo kebanyakan adalah orang-orang yang mengetahui cara mengajar dalam latar pendidikan sekolah, yakni sumber belajar yang pernah mengalami kegiatan belajar dengan pendekatan sekolah tradisional, kemudian cara yang demikian mereka terapkan dalam pelaksanaan belajar pendidikan luar sekolah. Berdasarkan laporan penelitian Kindervatter (1979) tentang kelompok belajar di Indonesia dan Thailand, ternyata pendekatan yang demikian tidak memuaskan warga belajar karena tidak memberi kesempatan kepada warga belajar untuk mengembangkan keterampilannya, terutama yang berhubungan dengan peningkatan mutu kehidupannya.

Memperhatikan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dalam kegiatan belajar pendidikan luar sekolah, terlihat bahwa permasalahan yang banyak dikemukakan oleh para pakar pendidikan luar sekolah ialah dalam hal pendekatan dan metoda. Sedangkan persoalan pendekat-

an dan metoda pendidikan luar sekolah telah didiskusikan dalam analisis sistem pendidikan luar sekolah.

g. Penilaian program belajar. Arikunto (1989) mengemukakan bahwa penilaian program belajar adalah suatu proses pembuatan pertimbangan tentang jasa, nilai atau manfaat, hasil, dan proses dari serangkaian kegiatan belajar. Selanjutnya dia mengatakan bahwa penilaian biasanya dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan tentang akan digunakan atau tidaknya suatu sistem, strategi, atau metoda.

Pengertian penilaian program belajar yang dikemukakan oleh Arikunto tersebut pada dasarnya dapat diterapkan dalam penilaian program belajar pendidikan luar sekolah. Akan tetapi permasalahan yang sering timbul dalam penilaian program belajar pendidikan luar sekolah ialah bahwa pengambilan keputusan sering dilakukan oleh "orang luar". Selain daripada itu, penilaian program belajar pendidikan luar sekolah sering pula cenderung pada penilaian hasil belajar yang diukur berdasarkan data yang bersifat kuantitatif. Pengukuran hasil belajar itu pun cenderung lebih menekankan kepada aspek kognitif dengan asumsi bahwa apabila seseorang (warga belajar) telah berpengetahuan tentang sesuatu lambat laun aspek lainnya akan menyusul.

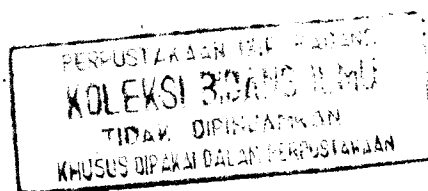
Seperti yang dikemukakan oleh Soedomo pada bagian terdahulu, hal yang demikian mungkin terjadi karena pada umumnya pendidikan luar sekolah ditangani oleh fasilitator/pamong belajar yang berlatar belakang pendidikan sekolah kemudian menerapkan pengalamannya tersebut dalam kegiatan pendidikan luar sekolah. Untuk penilaian program belajar di sekolah, mungkin pendekatan yang demikian tidak menjadi masalah, sebab pengambilan keputusan dalam perencanaan kegiatan belajar di sekolah menurut Buchori (1990) memang dimonopoli oleh birokrat. Selain daripada

itu, pelajar dalam kegiatan belajar sekolah memang disiapkan untuk keperluan jangka panjang dan bahkan menurut Hidayanto (1988) sekolah tidak mampu dan perlu menyiapkan tenaga kerja siap pakai.

Lain halnya dengan pendidikan luar sekolah, khususnya pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan di desa dalam rangka pemandirian, keputusan harus lebih banyak diambil oleh warga belajar sendiri. Selain daripada itu, kegiatan belajar pendidikan luar sekolah lebih menekankan pada pencapaian hasil yang "segera" dalam bentuk perubahan tingkah laku yang dapat diamati; yang dapat diterapkan oleh warga belajar dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu, hasil penilaian yang dilakukan--terutama oleh warga belajar sendiri--haruslah mengarah pada perbaikan program belajar mereka sendiri; merupakan diagnosis ulang agar kegiatan belajar dapat berkesinambungan.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, Soedomo (1989) mengusulkan langkah-langkah penilaian program belajar pendidikan luar sekolah yang serasi dengan kaidah-kaidah andragogi dan memberikan rumusan yang praktis. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, adalah penilaian reaksi yang mengumpulkan data mengenai bagaimana warga belajar memberikan tanggapannya terhadap program sebagaimana adanya. Bagaimana pandangannya terhadap program? Positif atau negatifkah sikap mereka terhadap program tersebut? Data tersebut dapat diperoleh melalui suatu "format reaksi akhir pertemuan", wawancara, ataupun melalui diskusi kelompok. Biasanya diharapkan untuk perolehan data di awal pertemuan, sehingga modifikasi program dapat dirundingkan secara bersama.

Kedua, penilaian belajar yang berhubungan dengan perolehan data tentang kaidah-kaidah, fakta-fakta, dan teknik-teknik yang dituntut atau dikuasai oleh warga belajar. Langkah ini meliputi pre-tes maupun pos-tes, sehingga pe-



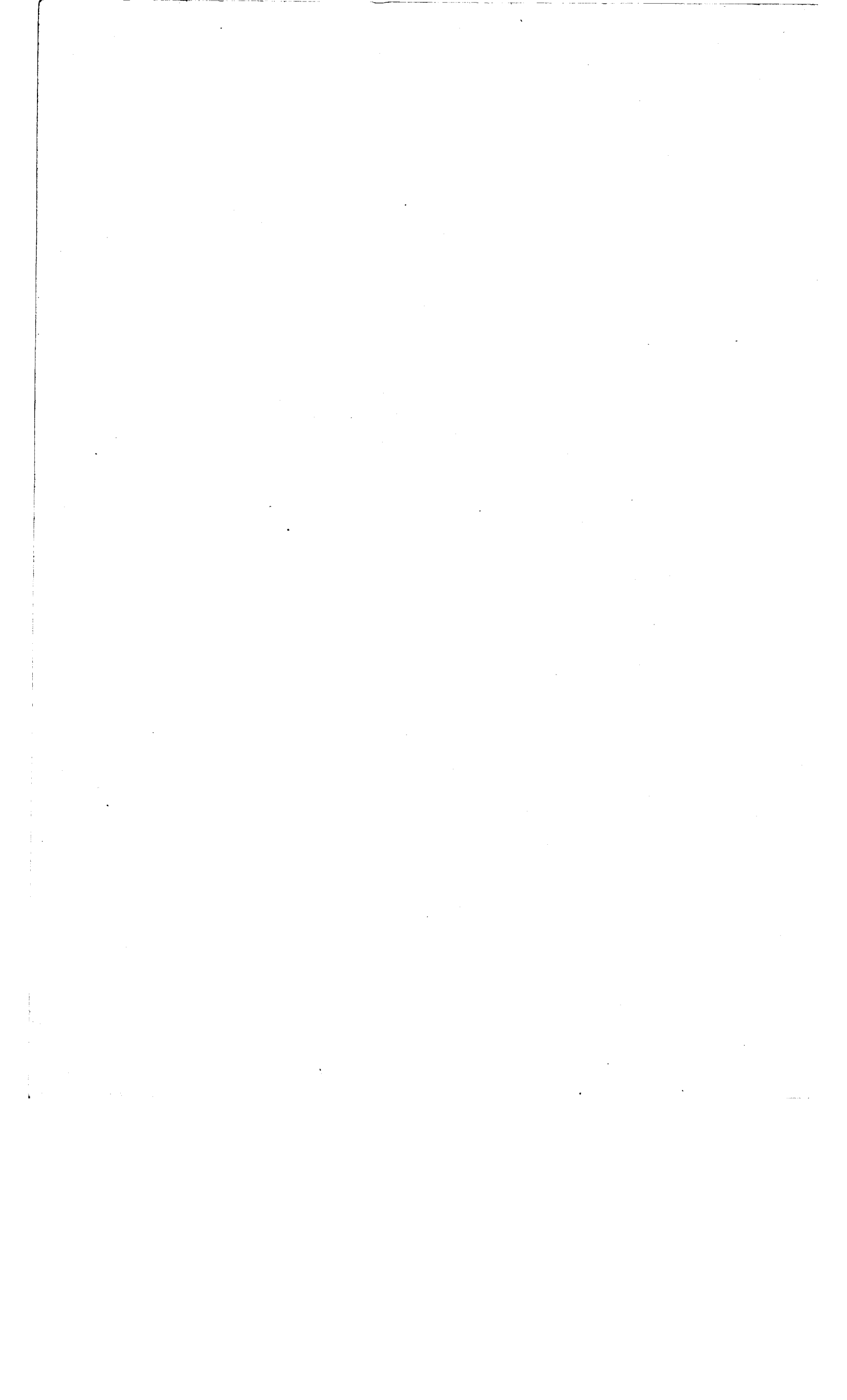
rolehan spesifikasi hasil belajar dapat diukur. Tes-tes ditujukan untuk mengukur performance, misalnya mengoperasikan mesin, berwawancara, menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan sebagainya dalam bentuk pelajaran keterampilan. Dapat juga menggunakan tes-tes lain yang diperlukan untuk mengukur pengetahuan misalnya. Bahkan alat tes lain seperti skala sikap, permainan peranan, simulasi, kasus-kasus kejadian kritis (critical event) harus didayagunakan untuk mengukur kemajuan sikap.

Ketiga, penilaian tingkah laku yang menuntut data seperti laporan pengamatan mengenai perubahan yang sesungguhnya terhadap apa yang dilakukan oleh warga belajar setelah mengikuti kegiatan belajar dibandingkan dengan sebelumnya. Sumber data jenis ini meliputi laporan produktivitas, rangkaian gerak waktu, skala pengamatan, para pengamat pendidikan, skala penilaian diri, angket, dan wawancara dan angket. Perlu dikemukakan bahwa penilaian tingkah laku haruslah didasarkan perolehan data dari berbagai sumber seperti yang dikemukakan tersebut.

Keempat, penilaian hasil yang tidak saja berhubungan perubahan dan kemajuan yang telah dicapai oleh warga belajar setelah mengikuti program belajar, akan tetapi lebih menekankan kepada efektivitas dan efisiensi program. Sehingga berdasarkan penilaian tersebut dapat dilakukan modifikasi dan pengembangan alternatif-alternatif lain untuk perancangan program belajar berikutnya.

DAFTAR BACAAN

- Abdulhak, Ishak (1986). Strategi Belajar Pendidikan Luar Sekolah (Modul 1 dan 6). Jakarta: Karunika, Universitas Terbuka
- Ahmuddipura, Enuh dan Suyatna Basar Atmaja (1986). Pendidikan Orang Dewasa (Modul 1 - 3). Jakarta: Karunika, Universitas Terbuka
- Arikunto, Suharsimi (1989). Penilaian Program Pendidikan. Yogyakarta: Bina Aksara
- Buchori, Mochtar (1990). "Transkrip Rekaman Prasarasehan" dalam Menuju Masyarakat Baru Indonesia. Jakarta: Kerjasama Harian Kompas dengan Gramedia
- Chambers, Robert (1983). Pembangunan Desa Mulai dari Belakang (Terjemahan Pepep Sudrajat). Jakarta: LP₃ ES
- Coombs, Philip H. dan Manzoor Ahmed (1974). Attacking Poverty: How Nonformal Education Can Help. Baltimore: The Johns Hopkins University Press
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1989). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Dewantara, Ki Hajar (1977). Pendidikan (Bagian Pertama). Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa
- Evan, David R. (1976). Technology in Nonformal Education A Critical Appraisal. Massachusetts: Center for International Education, University of Massachusetts
- Faisal, Sanapiah (1981). Pendidikan Luar Sekolah di dalam Sistem Pendidikan dan Pembangunan Nasional. Surabaya: Usaha Nasional
- Hidayanto, Dwi Nugroho--Ed--(1988). Mengenal Manusia dan Pendidikan. Yogyakarta: Liberty
- Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)
- Kindervatter, Suzanne (1979). Nonformal Education as an Empowering Process with Case Studies from Indonesia and Thailand. Massachusetts: Center for International Education, University of Massachusetts



- Koentjaraningrat (1987). Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia
- Lerbinger, Otto (1972). Designs for Persuasive Communication. New Jersey: Prentice-Hall
- Lindesmith, Alfred R., Anselm L. Strauss dan Norman K. Denzin (1977). Social Psychology. New York: Holt, Rinehart and Winston
- Lunandi, A.G. (1981). Pendidikan Orang Dewasa. Jakarta: Gramedia
- Mc Clelland, D.C. (1961). The Achievement Society. New York: Linton Educational Publishing, Inc.
- Nadler, Leonard (1982). Designing Training Programs: The Critical Event Model. Houston: Gulf Publishing Company
- Pranoto, Sarino Mangun (1987). "Pengantar" dalam Reimer, Everett, Sekitar Eksistensi Sekolah (Terjemahan M. Soedomo). Yogyakarta: Hanindita.
- Rogers, Everett M. dan F. Floyd Shoemaker (1981). Memasyarakatkan Ide-ide Baru (Terjemahan Abdillah Hanafi). Surabaya: Usaha Nasional
- Soedjatmoko (1985). "Pembangunan sebagai Proses Belajar" dalam Basis. XXXIV-8 dan XXXIV-9, Agustus dan September 1985
- Soedomo, M. (1989). Pendidikan Luar Sekolah ke Arah Pengembangan Sistem Belajar Masyarakat. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Depdikbud
- (1989/1990). Landasan Pendidikan. Malang: Fakultas Pascasarjana IKIP Malang
- Soenarwan (1990). Aktualisasi, Orientasi, dan Struktur Kelembagaan Pendidikan Luar Sekolah, Kini dan Masa Mendatang. Makalah, digandakan oleh Jurusan Pendidikan Luar Sekolah IKIP Malang
- (1991). Pendekatan Sistem dalam Pendidikan. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press
- (tanpa tahun). Self-Reliance Assessment. INNO-TECH - SEAMEO

- Solli, M. dan H. Imam Satokhid (1986). Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Pendidikan Luar Sekolah. Jakarta: Karunika, Universitas Terbuka
- Sularto, St. (1990). "Pendahuluan" dalam Menuju Masyarakat Baru Indonesia. Jakarta: Kerjasama Harian Kompas dengan Gramedia
- Sularto, St. dan Frans M. Parera (1990). "Membenahi Strategi Pendidikan" dalam Menuju Masyarakat Baru Indonesia. Jakarta: Kerjasama Harian Kompas dengan Gramedia
- Sumardi H.S., R. (1987). Identifikasi Kebutuhan Belajar dan Bahan Belajar Pendidikan Luar Sekolah. Jakarta: Karunika, Universitas Terbuka
- Surakhmad, Winarno (1977). Mencari Strategi Pembinaan Pendidikan Pembangunan Dewasa ini. (Tanpa tempat dan Penerbit)
- Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wahid, Abdurrahman (1984). "Pembebasan Melalui Pendidikan Punyakah Keabsahan?" dalam kata pengantar untuk buku Freire, Paulo Pendidikan sebagai Praktek Pembebasan (Terjemahan Alois A. Nugroho). Jakarta: Gramedia